

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai
(Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat
Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AGUSTINO ADI NUGROHO
NIM. 0310310006



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

2008

RINGKASAN

Agustino Adi Nugroho, 2003, **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai** (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) Prof. Dr. Agus Suryono, M.S, Dra. Siti Rochmah, M.Si, 93 halaman + x.

Hampir setiap permasalahan dalam pembangunan ekonomi mengarah pada teknologi. Teknologi adalah wujud dari ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk mencari, menggali dan mengolah kekayaan alam untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Untuk mendorong masyarakat sesuai dengan maksud tersebut di atas maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, mengubah kebijakan yang selama ini menempatkan desa sebagai garis belakang dalam proses pembangunan menjadi garis depan.

Adapun Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang besar dan tersebar di seluruh pelosok desa, salah satunya yaitu Desa Urek-urek. Namun potensi ini kurang dimanfaatkan dengan baik. Agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam artian tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat kebutuhan dan tepat kemampuan dari masyarakat penggunaannya.

Untuk itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai studi pada BPM Kabupaten Malang dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program diawali dengan tahap persiapan diawali inventarisasi dan identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok masyarakat, pengajuan proposal. Baru setelah itu pelaksanaan program, diawali dengan pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebaran, dan evaluasi program.

Dari data yang ada produktivitas dan penghematan waktu, pendapatan, kesehatan, pendidikan dan pengetahuan setelah adanya program ini meningkat sangat baik. Dalam pelaksanaan program terdapat faktor pendorong yaitu keadaan alam dan lingkungan yang sesuai, teknologi yang diberikan sesuai dengan potensi, kepedulian pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedang faktor penghambatnya yaitu interaksi yang kurang harmonis antar petugas lapangan dengan masyarakat, Masalah dana, sosial budaya masyarakat desa yang masih kolot.

SUMMARY

Agustino Adi Nugroho, 2003, **Society Empowerment Passes Appropriate Technology Soy Bean Breaker Engine Program** (Study in Society Empowerment Service and Society Urek-urek Village Gondanglegi District Malang Regency) Prof. Dr. Agus Suryono, M.S, Dra. Siti Rochmah, MSi, 93 page + x.

Almost every problems in economy development aims in technology. Technology concrete of science that applied to research, dig and cultivate natural resources to increase alive standard and human welfare. To realize society as according to above mentioned purpose so society empowerment must be done.

Society Empowerment Service (BPM) Malang regency carries out society empowerment program at purpose to change society patterned thinking up at more progress, change policy so far to place village as back line in course of development is front line.

As to Malang regency has much natural resources and widespread in all village outlying place, one of them that is Urek-urek village. But the potency this is less maked use well. In order to that potency can be maked use in an optimal, success to and utilizable need human resource have a certain quality use appropriate technology in meaning, correct use, correct need and correct ability from the user society.

So empowerment society necessary need to pass appropriate technology soy bean breaker engine program in BPM of Malang Regency and society urek-urek village gondanglegi district.

Result from research shows that execution a program is preced with preparation stage is precede inventarisasi and identification village's potency, society group formation, submission proposal. After that the next step is execution program, preced with training and instruction, development and dissemination, and evaluation program.

From the existing data, productivity and time economically, income, well-being, education and knowledge after this program existence increases very good. In execution program there are factor can stimulate that is nature conditon and appropriate environment, technology that given as suitable to potency, government pay attention to overcome poverty problem. Than the chase factor are less interaction between field operator and society, fund problem, and social culture that still conservative.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaiku Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai” (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

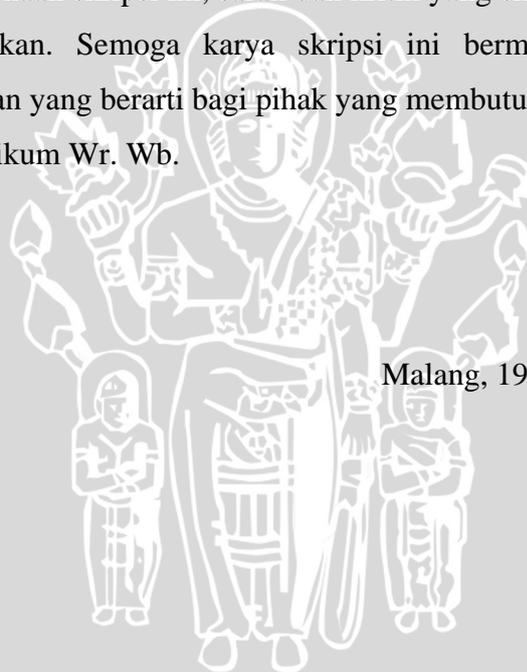
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin A.W, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, M.S selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, serta waktu dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Siti Rochmah, Msi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, pengarahan, serta waktunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak Drs. Soepriyanto, M.Si, Bapak Drs. R. Bambang Prianto, Bapak Nandang selaku Kepala BPM, Kepala Bidang Pemberdayaan UEI dan Pendayagunaan TTG, Kepala Bidang Tata Usaha pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang beserta staf atas bantuan tenaga, pikiran serta informasi guna mendukung terselesainya skripsi ini.

6. Bapak Riyanto selaku Kepala Desa Urek-urek beserta staf di Kantor Desa Urek-urek atas segala bantuan serta informasi dan keterangan guna mendukung terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Buari selaku Ketua Kelompok Masyarakat pengerajin tahu dan tempe Desa Urek-urek yang telah memberikan informasi guna memperoleh data yang relevan dalam skripsi ini.
8. Semua Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Ayah, Ibu dan Adik di Jember atas do'a, kasih sayang dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 19 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
RINGKASAN	ii
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Alur Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Masyarakat Desa	11
1. Pengertian Masyarakat	11
2. Pengertian Desa	12
3. Karakteristik Desa.....	12
4. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa.....	14
5. Pendidikan Yang Diperlukan Dalam Rangka Pembangunan Pedesaan.....	15
6. Kesehatan di Pedesaan.....	17
B. Pengertian Pemberdayaan	18
1. Pemberdayaan dan Strategi Pembangunan	19
2. Tahapan Pemberdayaan	20
3. Pendekatan Pemberdayaan.....	22
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	24
C. Kajian Teoritis Tentang Teknologi.....	24
1. Teknologi Penunjang Pembangunan dan Perekonomian... ..	24
2. Problema Pengembangan Teknologi.....	26
3. Kebutuhan Teknologi Yang Tepat Guna	27
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	29
5. Peningkatan Kesejahteraan	30
D. Program Teknologi Tepat Guna.....	30
1. Program Pemerintah.....	30
2. Program Teknologi Tepat Guna.....	31



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Analisis Data.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	45
1. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.....	45
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Urek-urek.....	52
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai oleh BPM Kabupaten Malang.....	57
4. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Terhadap Kelompok Sasaran.....	64
5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai.....	68
B. Analisis dan Interpretasi.....	71
1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai oleh BPM Kabupaten Malang.....	72
2. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Terhadap Kelompok Sasaran.....	79
3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman		
Tabel No. 1	Jumlah Pegawai BPM	49
Tabel No. 2	Pendidikan Penjenjangan.....	50
Tabel No. 3	Eselonisasi.....	51
Tabel No. 4	Masa Kerja.....	51
Tabel No. 5	Pola Penggunaan Tanah Desa Urek-urek.....	52
Tabel No. 6	Komposisi Penduduk Menurut Usia Pendidikan Desa Urek-urek	54
Tabel No. 7	Komposisi Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja Desa Urek-urek	54
Tabel No. 8	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Urek-urek	55
Tabel No. 9	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Urek-urek	56
Tabel No. 10	Potensi Desa Hasil Palawija Desa Urek-urek	58
Tabel No. 11	Produksi (Kg) Sebelum dan Sesudah Program	65
Tabel No. 12	Produksi (Rp) Sebelum dan Sesudah Program	65
Tabel No. 13	Waktu Produksi Sebelum dan Sesudah Program.....	66
Tabel No. 14	Pendapatan, Biaya Produksi, Laba Bersih, Sebelum dan Sesudah Program.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar No. 1 Model Analisis Interaktif 43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
- Lampiran 2 Berita Acara Penyerahan Barang
- Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala BPM Kabupaten Malang Tentang Pembentukan Panitia Pelatihan TTG
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor BPM Kabupaten Malang
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Surat Keterangan Dari KESBANG DAN LINMAS Kabupaten Malang untuk mengadakan penelitian Di BPM Kabupaten Malang



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat dan teknologi. Hampir setiap permasalahan dalam pembangunan mengarah pada teknologi. Permasalahan lain yang selalu membayangi pelaksanaan pembangunan adalah masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sekalipun usaha pembangunan telah membawa hasil yang melegakan namun kemiskinan adalah masalah dasar yang belum terpecahkan. Yang ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional dan penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional disebutkan “sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter terhenti dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam”. Dan membawa dampak pada lesunya roda perekonomian nasional.

Sesuai dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi pertumbuhan ekonomi, strategi pembangunan ketika itu menitikberatkan pada sektor industri skala besar. Dengan pembangunan sistem ekonomi konglomerasi, Indonesia telah mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% per tahun (Media Indonesia, 24 April 2006).

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang tidak terlepas dari peran industri besar (konglomerasi). Karena kebijakan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dengan pemihakan kepada sistem ekonomi konglomerasi (SEK). Akan tetapi sistem ekonomi konglomerasi (SEK) yang banyak diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak wajar seperti monopoli, telah mengakibatkan pembangunan ekonomi yang tidak mengakar pada rakyat dan semakin memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dampak paling buruk yang kita rasakan adalah tingginya tingkat inflasi,

mencapai 80% pada tahun 1998), pertumbuhan ekonomi minus 13,2% dan tingginya angka pengangguran untuk usia produktif (Media Indonesia, 24 April 2006).

Tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1970 mencapai 67,9 juta penduduk atau 58,9%. Pada tahun 1996 presentase itu turun menjadi 34,5%. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 meningkat lagi menjadi 49,5% dan pada tahun 1999 kembali menurun menjadi 23,4% atau 48 juta penduduk. Pada tahun 2004 masih ada sebanyak 36,2 juta atau 16,7% penduduk miskin (Puspaningrum,2001:182).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total penduduk. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2005, berarti jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta orang, dengan catatan 2,06 juta di pedesaan dan 1,89 juta di perkotaan.

Bertitik tolak dari gambaran seperti itu membuktikan bahwa sistem ekonomi konglomerasi (SEK) yang pada masa orde baru dipakai sudah tidak relevan untuk dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian Seers pada tahun 1972, dalam Suryono (2002, 81) “bahwa penerapan strategi pembangunan ekonomi di beberapa negara berkembang telah mengabaikan masalah pemerataan (distribusi), baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan”. Untuk itulah paradigma pembangunan perlu mengalami pergeseran dari yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi atau “*Growth Strategy*” ke arah “*People Centered Development*” dengan menekankan pada upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Jika pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu lingkaran maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan daerah atau pedesaan. Karena didasarkan pada beberapa alasan:

1. Bahwa kurang lebih 80 % penduduk Indonesia berdiam diri di pedesaan. Sehingga apabila pembangunan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan yang dimaksud harus melibatkan secara langsung (tidak langsung) 80% penduduk pedesaan. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Koentjoroningrat (1991:43) bahwa:

Dalam pembangunan nasional dewasa ini titik berat pembangunan dimulai dari pembangunan daerah pedesaan, mengingat tujuan

pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, sedangkan lebih dari 80% penduduk Indonesia masih berdomisili di wilayah pedesaan.

2. potensi sumber daya alam sebagian besar terdapat di daerah pedesaan yang berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan tenaga kerja.
3. dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan nasional maka basis pertahanan dan keamanan terletak di desa. Peningkatan daya tahan desa mengharuskan pembangunan desa dan desa memerlukan perhatian yang istimewa.

Dilihat dari sudut pelapisan mata pencahariannya, maka masyarakat yang hidup di pedesaan harus mencari nafkah sebagai petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, buruh industri dan banyak lagi jenis pekerjaan lain yang serupa. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan seperti terkungkung dalam perangkap kemiskinan.

Untuk mengatasi atau mengeliminir masalah kemiskinan tersebut, maka menurut Juoro (1985:6) ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) adanya sumber-sumber untuk menghapuskan kemiskinan; (2) adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan.

Sumber-sumber untuk menghapuskan kemiskinan itu sebetulnya sudah tersedia di pedesaan antara lain sumber daya yang berupa jumlah penduduk dan kekayaan alam yang melimpah di desa pada dasarnya merupakan modal yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan aset kekayaan yang berupa modal lancar yang terdapat di kota. Dalam sistem saling ketergantungan disaat mekanisme pasar berlaku nantinya sumber daya manusia di Indonesia yang relatif lebih murah ongkosnya dibandingkan dengan negara lain merupakan sumber devisa dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pendapatan negara. Demikian pula dengan kekayaan alam yang hingga saat ini belum dimanfaatkan.

Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya baik manusia maupun alam yang ada di desa agar tercipta kemakmuran bagi masyarakat desa sendiri dan pengembangan perekonomian desa. Karena desa merupakan subyek sekaligus obyek dalam masa pembangunan haruslah sadar akan keberadaannya dan kesiapannya dalam menghadapi ekonomi pasar dan era globalisasi.

Dalam hal ini maka peranan birokrasi (aparatur pemerintah) sangat diperlukan supaya dapat menggerakkan jiwa kemandirian pada masyarakat desa. Selain itu perlu juga menumbuhkan peran desa dalam bidang perekonomian, seperti usaha dalam peningkatan nilai tukar dari produk-produk hasil desa. Isu tentang pemberdayaan ekonomi rakyat semakin menjadi fokus sentral. Melalui paradigma baru pembangunan diharapkan tidak terjadi lagi pemusatan ekonomi pada segelintir orang atau golongan melainkan justru harus memperluas aset produktif ke tangan rakyat. Perubahan arah pembangunan saat ini diarahkan dengan proses yang berpusat pada rakyat, sehingga rakyat lebih mampu menempatkan dirinya sebagai subyek dari pembangunan.

Dengan situasi demikian, sangat terasa sekali bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagian besar penduduknya miskin dan bermukim di pedesaan. Hal ini ironi karena sumber daya alam di daerah pedesaan umumnya sangat besar, tetapi mengapa penduduknya justru yang paling banyak menderita kemiskinan. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Di era keterbukaan ekonomi, perlu adanya pemihakan yang tegas dari pemerintah kepada pengembangan ekonomi rakyat, agar ekonomi lemah tidak menjadi korban liberalisasi. Hal ini penting bagi pengembangan kelembagaan yang perkembangannya memungkinkan golongan ekonomi lemah dapat berswadaya.

Pemihakan pada golongan ekonomi lemah ini dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan lembaga usaha kecil dalam rangka memperbesar aksesnya kepada aset produksi terutama tanah, modal, mengembangkan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi mereka, pengembangan sumber daya manusia dan keterbukaan akses mereka pada pasar. Kesemuanya itu penting bagi pengembangan kelembagaan yang memungkinkan golongan ekonomi lemah dapat berswadaya. Dengan demikian konteks pemberdayaan masyarakat yang mempunyai usaha kecil agar dapat tangguh dan mandiri.

Masyarakat di pedesaan merupakan masyarakat ekonomi lemah, meskipun mereka mempunyai usaha di bidang ekonomi, tergolong industri kecil yang bukan hanya lemah dalam akses modal, manajemen usaha, sumberdaya manusia, pemasaran produk, tetapi juga lemah dalam akses pembinaan dan pengembangan baik dalam aspek institusi kelembagaan, pembinaan, pengembangan, fasilitas alokasi kredit. Perekonomian rakyat harus dimengerti sebagai aktivitas yang seluruh proses kegiatannya diselenggarakan oleh rakyat secara informal maupun tradisional, di pedesaan maupun perkotaan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan mereka. Tidak ada persyaratan khusus yang dituntut hanya keuletan, tekun dan bersedia melakukan segala pekerjaan, baik wanita maupun pria.

Dalam meningkatkan nilai tukar dari produk-produk desa maka yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produk itu sendiri, terutama kualitasnya baru kemudian kuantitasnya. Untuk mencapai itu, hal yang perlu diperhatikan teknologi yang digunakan menghasilkan produk tersebut. Karena teknologi merupakan sesuatu yang penting dalam strategi pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Juoro (1985:136) bahwa:

“Teknologi merupakan variabel penting di dalam strategi pembangunan. Hampir setiap permasalahan dalam pembangunan ekonomi mengarah pada teknologi. Teknologi adalah wujud dari ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk mencari, menggali dan mengolah kekayaan alam untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia.”

Untuk mendorong masyarakat sesuai dengan maksud tersebut di atas maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan, karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di dalam pemberdayaan masyarakat banyak sekali bidang pemberdayaan masyarakat yaitu, bidang sosial, ekonomi, budaya, hankam, dan politik. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di pedesaan tentunya yang dipakai di sini yaitu model pemberdayaan bidang ekonomi. Salah satunya program pemanfaatan teknologi tepat guna merupakan salah satu upaya bentuk pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan produk-produk usaha mereka.

Hal ini di tuangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 1992 tentang Pengenalan dan Pemasaryakatan Teknologi Tepat Guna di pedesaan. Yang dimaksud teknologi tepat guna disini lebih ditekankan pada azas manfaat,

yaitu untuk meningkatkan nilai tambah. Sehingga dimanapun tingkatannya baik rendah, menengah maupun maju apabila memenuhi syarat baik penguasaan, pengadaan sarana/prasarananya dan dapat dipertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensinya.

Program ini memberi bantuan berupa barang atau teknologi, sehingga dengan teknologi tersebut diharapkan dikenal oleh masyarakat akan timbul daya kreativitas dari masyarakat tersebut tentang bagaimana cara penggunaannya sampai dengan perawatannya. Maksudnya agar masyarakat lebih terbuka terhadap pengetahuan baru, karena salah satu karakteristik masyarakat di daerah adalah *lack of innovativeness* artinya ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru.

Teknologi tepat guna haruslah tepat baik teknologi yang digunakan maupun kesesuaiannya dengan lingkungan dimana teknologi itu akan diterapkan. Apabila teknologi itu tidak disesuaikan dengan lingkungan maka teknologi itu akan sia-sia atau tidak berguna. Selain itu dari teknologi yang digunakan nantinya akan memberi nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, dan produk ini bisa bersaing dengan produk lain di pasaran.

Adapun Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang besar dan tersebar di seluruh pelosok desa, namun potensi ini kurang dimanfaatkan dengan baik. Agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam artian tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat kebutuhan dan tepat kemampuan dari masyarakat penggunanya.

Masalah yang sedang dihadapi Kabupaten Malang saat ini yaitu tingginya jumlah kemiskinan. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malang ditargetkan berkurang 2% atau sekitar 13.000 keluarga per tahun. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Nehrudin, persentase pengurangan ini memang terbilang kecil. Total jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malang sendiri mencapai 164.000 keluarga yang tersebar di 390 desa/kelurahan di 33 kecamatan (Kompas, 10 September 2006).

Dengan teknologi tepat guna diharapkan dapat menunjang peningkatan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Berbagai program yang

sedang dan akan dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau menjadi pelaku pembangunan yang handal, tangguh mandiri dan sejahtera, maka salah satu upaya untuk mendorong masyarakat meningkatkan kemampuannya adalah dengan membekali pengetahuan dan keterampilan agar dalam usahanya sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.

Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, mengubah kebijakan yang selama ini menempatkan desa sebagai garis belakang dalam proses pembangunan menjadi garis depan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat masyarakat Kabupaten Malang masih banyak yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang cukup mengikat dan pola anutan bagi tokoh-tokoh tertentu.

Desa Urek-urek merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini jika diolah dengan benar maka akan menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat desa tersebut. Potensi yang ada yaitu lahan pertanian yang luas dan memungkinkan menghasilkan hasil-hasil pertanian yang dapat diandalkan. Hasil pertanian ini mendorong tumbuhnya usaha kecil dengan memanfaatkan bahan baku hasil dari pertanian tersebut. Salah satunya usaha kecil dan rumah tangga yang ada di Desa Urek-urek yaitu usaha tempe dan tahu.

Desa urek-urek pada akhir tahun 2005 mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai. Dimana tujuan dari program ini memberdayakan para pengrajin tempe supaya lebih maju dan sejahtera. Dan diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja dan mampu mempengaruhi masyarakat sekitar yang lain untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Berkaitan dengan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program pemerintah yang sudah berjalan mulai akhir tahun 2005 memberi dampak bagi pemberdayaan masyarakat Desa Urek-urek. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini yaitu : **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai”**.

(Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan TTG mesin pemecah kedelai di Kabupaten Malang?
2. Dampak Pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan TTG mesin pemecah kedelai?
3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program Pemanfaatan TTG Mesin Pemecah Kedelai?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui TTG mesin pemecah kedelai yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Malang.
2. Untuk memberikan gambaran dampak pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan TTG mesin pemecah kedelai.
3. Mendeskripsikan Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemanfaatan TTG mesin pemecah kedelai.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai dasar atau langkah awal bagi penelitian yang serupa di masa datang serta dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang lebih luas tentang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai.

2. Secara Akademis

Sebagai bahan bacaan, referensi, kajian dan rujukan akademis pada umumnya dan untuk menambah wawasan pengetahuan atas pemberdayaan masyarakat yang baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah bagi penulis pada khususnya.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

E. Alur Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian ini ditujukan agar sesuatu yang dihadapi dalam skripsi ini dapat dimengerti secara jelas dan tepat di dalam bab-bab yang saling berkaitan. Adapun uraian masing-masing bab tersebut akan memuat hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan uraian tentang latar belakang masalah-masalah, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan materi skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan uraian tinjauan atas kepustakaan yaitu berisi teori yang berhubungan dengan penelitian, baik yang mendukung maupun yang membandingkan, untuk kemudian dibuat kesimpulan dari teori yang telah dikaji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membagi dalam dua sub bagian pokok, yaitu penyajian data di lapangan dan analisis hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya dikemukakan saran-saran yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

Analisa terhadap suatu masalah akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila ditunjang dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah itu sendiri. Teori sangat penting sebagai alat bantu dalam menentukan masalah yang akan diteliti, serta untuk dijadikan pedoman dalam mencari permasalahannya. Disamping itu teori juga akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1998:19) dalam bukunya metode penelitian masyarakat, mengatakan “Bahwa teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan”.

Oleh karena itu untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, juga diperlukan teori-teori yang dipakai sebagai dasar untuk menunjang pembahasan. Teori dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menemukan permasalahan dan memudahkan dalam mencari jalan keluar permasalahan yang dijumpai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis menggunakan beberapa teori tentang pemberdayaan masyarakat dan teknologi penunjang pembangunan dan perekonomian, serta teori-teori lain yang terkait sebagai dasar pembahasan.

A. Masyarakat Desa

1. Pengertian Masyarakat

Menurut Soekanto (1990:13) masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia keseluruhan yang selalu berubah inilah yang dinamakan masyarakat.

Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mempunyai tempat tinggal tertentu di mana para anggotanya memiliki kesamaan kepentingan sehingga menimbulkan ikatan batin di antara mereka.

Dalam berbagai kepustakaan, masyarakat dapat diklasifikasikan secara histories ke dalam tiga kategori, yaitu masyarakat yang bersifat tradisional, masyarakat yang bersifat peralihan atau transisi dan masyarakat maju atau modern. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya termasuk dalam kategori masyarakat peralihan atau transisi, demikian juga Indonesia.

2. Pengertian Desa

Menurut UU Nomor 5/1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedang menurut Bintarto desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang memiliki kesamaan-kesamaan seperti tempat tinggal, nilai, kepentingan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh keadaan fisiografi, sosial ekonomi, politis dan kultural sebagai satu kesatuan yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

3. Karakteristik Desa

Setelah mengetahui pengertian desa maka perlu dikaji tentang karakteristik desa. Karakteristik desa menurut Rogers (1969) yang dikutip oleh Leibo(1995:7), adalah sebagai berikut:

a. *mutual distrust interpersonal relations*

Yang dimaksud adalah rasa ketidakpercayaan timbal balik antara masyarakat satu dengan yang lain. Ini bisa terjadi karena sesama anggota komunitas dalam memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sudah terbatas.

b. *perceived limited good*

Ini artinya, terdapat pandangan yang sempit di kalangan masyarakat, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan yang timbul dari berbagai etnik dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Masyarakat Jawa misalnya, “*lakune wong urip, gumintang nasibe dewe-dewe*” (orang hidup itu tergantung nasibnya sendiri-sendiri). Dengan ungkapan ini sebenarnya telah terbentuk persepsi masyarakat yang “belum beruntung” dan banyak jumlahnya, betapa terbatasnya pemikiran mereka untuk maju.

c. *dependency on hostility toward government authority*

Yang dimaksud adalah ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau unsur-unsur pemerintah.

d. *familism*

Disini tercermin rasa kekeluargaan, adanya keakraban di antara orang-orang yang memiliki kekerabatan. Karakteristik ini tidak sulit dijumpai pada masyarakat desa. Akan tetapi perlu diingat bahwa longgarnya rasa kehidupan kekeluargaan bisa terjadi kalau masyarakatnya semakin maju (tersedianya infrastruktur yang memadai) sehingga mereka dengan mudah melakukan mobilitas geografis, disamping derasnya mekanisme ekonomi uang dalam masyarakat itu.

e. *lack of innovativeness*

Ini artinya ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Kondisi ini ada dalam masyarakat desa yang relatif belum berkembang atau belum maju. Belum berkembang/belum maju dapat terjadi karena dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia dan mampu menghidupi mereka. Biasanya mereka baru akan menerima ide-ide baru kalau daya dukung alam sudah mulai terasa kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau adanya perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di bidang ekonomi, sedangkan di sisi lain pertambahan penduduk belum bisa dikendalikan secara serius.

f. *fatalism*

Ini menggambarkan betapa rendah wawasan pikiran masyarakat desa untuk menanggapi atau merencanakan masa depan mereka. Sikap semacam ini

tercermin dari adanya pandangan seseorang bahwa keberhasilan yang dicapai bukanlah dari kerja keras dalam diri setiap orang, akan tetapi justru berada di luar dirinya (kekuatan supranatural). Ini erat kaitannya dengan tradisi, sehingga bisa dilihat hubungan antara nilai budaya tradisional dengan derajat fatalistis dalam masyarakat.

g. *limited aspiration*

Yang dimaksud adalah adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk menggapai masa depan. Aspirasi sosial, sesungguhnya semacam gagasan, keinginan ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seseorang mengenai masa depan yang akan datang dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya.

h. *lack of deffered gratification*

Ini artinya kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri, yakni untuk mengorbankan kenikmatan sekarang, demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan.

i. *Limited view of this world*

Karakteristik ini mencerminkan dalam masyarakat terdapat pandangan yang terbatas tentang dunia luar. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan mereka untuk mengadsorbsi atau menyerap sesuatu yang datang dari luar komunitas mereka. Seperti penyerapan berita yang ada di media massa (televisi, radio, koran dan sebagainya).

j. *low emphaty*

Ini adalah karakteristik yang ada dalam masyarakat desa ditandai dengan rendahnya keterampilan “menangkap” peranan orang lain. Atau dapat dikatakan secara pendek, masyarakat desa memiliki derajat empati yang rendah. Rendahnya empati dari masyarakat disebabkan oleh adanya jarak sosiopsikologis maupun pengetahuan yang terbatas, dibandingkan dengan masyarakat di luar mereka, yang sudah berkembang lebih maju.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa

Berdasarkan karakteristik desa, maka sudah dapat diketahui bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat desa yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat desa mengandalkan kehidupannya pada sektor

alam atau lahan pertanian walaupun ada yang menggantungkan pada sektor industri masih sebatas pada industri rumah tangga, dan lahan pertanian ini pun akan menyempit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di desa yang membutuhkan untuk tempat tinggal. Dan mereka tidak ada upaya untuk meningkatkan hasil dari pertanian dan usaha industri rumah tangga mereka. Kebanyakan cara kerja mereka hanya mengandalkan pada teknik tradisional saja.

Berbagai hasil studi telah menunjukkan rendahnya pendapatan sebagian besar masyarakat desa dan tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Hal demikian menyebabkan rendahnya kualitas hidup serta melanggengkan pola ketidakadilan. Celaknya bagi orang golongan berpendapatan rendah bukan main sulitnya untuk mengembangkan usaha memperoleh pendapatan yang tinggi, karena hambatan-hambatan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang ada belum dapat memberikan manfaat atau keuntungan yang memadai kepada sebagian besar masyarakat desa, karena belum mampu berperan besar dalam mendukung terciptanya interaksi yang baik seimbang antara golongan atas yang merupakan sejumlah kecil penduduk desa dan golongan bawah yang jumlahnya jauh lebih besar (Juoro,1985:6).

Untuk itulah kemudian pemerintah mengeluarkan program untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yaitu dengan jalan memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna baik dalam bidang pertanian, peternakan, maupun industri pedesaan. Sehingga produktivitas mereka meningkat yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu diharapkan dengan program pemanfaatan teknologi tepat guna dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya kreativitas masyarakat desa dalam berpikir, bekerja, dan berusaha.

5. Pendidikan Yang Diperlukan Dalam Rangka Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan merupakan hasil dari berbagai kekuatan yang berinteraksi. Salah satu kekuatan itu pasti pendidikan dalam aneka bentuk dan menyangkut sejumlah besar penduduk, namun jika tidak ada kekuatan pelengkap lainnya, pendidikan itu tidak akan mampu membangkitkan proses dinamik untuk pembangunan pedesaan (Combs dan Ahmed, 1985:19).

Setelah pendidikan bergerak maju, proses kemajuan itu dapat menyebar ke sektor-sektor lainnya. Pendapatan pertanian yang meningkat, akan menimbulkan

kebutuhan sejumlah barang dan jasa-jasa yang kian lama kian meningkat baik dalam lingkungan pertanian maupun luarnya. Hal ini akan berdampak pada bidang usaha lainnya akan merasakan rangsangannya. Dan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan untuk aneka ragam usaha pembangunan pedesaan.

Sebagai bagian dari proses ini, maka banyak barang-barang dan teknologi baru merembes masuk di daerah dan terjadi spesialisasi dan pembagian tugas baru dalam masyarakat pedesaan serta dalam struktur lapangan kerja di desa-desa dan pusat-pusat pedesaan.

Namun keadaan pedesaan mempunyai banyak perbedaan yang besar antara masing-masing daerah pedesaan berkenaan dengan kekayaan sumber alamnya, potensi pembangunan dasar, dalam tahap kemajuan masing-masing dan prasarana ekonomi yang tersedia, dan dalam kesanggupan atau kesediaannya masing-masing untuk bergerak maju. Pada desa yang dekat dengan kota berpotensi mengalami modernisasi yang pesat dan ikut serta dalam kemajuan daerah perkotaan didekatnya. Pada desa lain yang terpencil ditemukan desa yang kurang di dalam segala sumber dayanya, terkecil dari masyarakat dan perekonomian yang besar-besar, bahkan boleh dikatakan jauh dari alam modern seperti sekarang.

Mengingat keanekaragaman daerah pedesaan ini maka jelaslah tidak terdapat rumusan yang sama untuk mencapai pembangunan pedesaan dalam segala situasi, dan tidak pula terdapat rumusan umum mengenai corak pendidikan yang cocok untuk menggalakkan pembangunan pedesaan itu.

Banyak sekali dan bercorak ragam kebutuhan akan pendidikan usaha untuk pembangunan pedesaan, namun menurut Combs dan Ahmed (1985 : 21) untuk keperluan praktis seluruh kebutuhan itu dapat dibagi menjadi empat kelompok :

1. *pendidikan umum dan dasar* : melek-aksara, melek angka, pengertian dasar ilmu pengetahuan dan lingkungan yang pada umumnya diusahakan oleh sekolah dasar dan lanjutan umum.
2. *pendidikan kesejahteraan keluarga* : terutama dirancangkan untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan watak yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencakup mata pelajaran seperti ilmu kesehatan, ilmu gizi, kepandaian rumah tangga dan pengasuhan kanak-kanak, pemeliharaan dan penyempurnaan perumahan, keluarga berencana, dan sebagainya.

3. *pendidikan kemasyarakatan* : yang bertujuan mengokohkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga dan proses-proses daerah dan nasional melalui pengajaran tentang soal-soal pemerintah daerah dan negara, gerakan koperasi, proyek pembangunan masyarakat
4. *pendidikan kejuruan* : dirancang untuk membina kepandaian atau keterampilan tertentu yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi, dan yang berfaedah untuk mencari nafkah.

Keempat corak pendidikan itu perlu baik bagi kaum remaja maupun bagi orang-orang dewasa, pria dan wanita.

6. Kesehatan di Pedesaan

Di dalam membicarakan kesehatan pasti erat kaitannya dengan pembangunan. Setiap segi pembangunan saling mendukung satu sama lain. Juga kesehatan dan pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh. Kemajuan ekonomi mendorong perbaikan gizi yang memperkuat daya tahan tubuh. Kemajuan ekonomi juga mendorong perbaikan lingkungan hidup antara lain perumahan yang permanen dan sanitasi yang memadai sehingga mengurangi kejangkitan penyakit. Rendahnya kejangkitan penyakit dan tingginya daya tahan tubuh pada akhirnya meningkatkan taraf kesehatan. Sehingga taraf kesehatan dapat mendukung daya belajar dan daya kerja (Hagul, 1985:103).

Masalah kesehatan yang paling menonjol di daerah pedesaan adalah tingginya angka kejadian penyakit menular, kurangnya pengertian masyarakat tentang syarat hidup sehat, gizi yang jelek, dan keadaan *hygiene* dan sanitasi yang jauh dari memuaskan. Kejadian penyakit menular ini sebenarnya banyak bisa dikurangi kalau memiliki pengertian yang baik mengenai syarat hidup sehat dan dengan di perbaikinya keadaan *hygiene* dan sanitasi. Keadaan gizi yang jelek membuat keadaan lebih buruk karena menyebabkan daya tahan tubuh kurang, mudah terserang penyakit, dan berakibat pula pada tingginya angka kematian dari penderita penyakit menular tersebut.

Selain itu fasilitas kesehatan yang kurang di daerah pedesaan menyebabkan sebagian besar masyarakat masih sulit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengobatan. Dan walaupun fasilitas layanan itu tersedia sering tidak tersedia sarana yang cukup. Hal lain yang mempersulit usaha pertolongan pengobatan adalah kenyataan yang sering dimana penderita atau keluarga penderita tidak dengan segera berusaha mencari pertolongan pengobatan,

diusahakan cara-cara lain untuk menyembuhkan dengan berusaha mengusir “benda asing” atau “*spirit*” yang masuk ke dalam badan si sakit.

Keadaan semacam merupakan keadaan yang umum dijumpai di pedesaan. Di mana tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan merupakan keadaan yang menonjol. Dalam lingkup permasalahan seperti di atas. Jelas bahwa usaha untuk mengatasinya tidak sekedar usaha kedokteran yang menyangkut hal-hal seperti obat, dokter, perawat, rumah sakit, dan lain sebagainya. Melainkan harus meliputi aspek yang lebih luas.

B. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Friedmann (1992:126) konsep pemberdayaan diartikan sebagai alternatif pembangunan yang menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, baik melalui partisipasi, demokrasi maupun pembelajaran sosial. Dimana di dalam pemberdayaan yang menjadi titik fokusnya adalah lokalitas, sebab “civil society” akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, tetapi hal ini akan menjadi tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar *civil society* diabaikan.

Di sisi lain pemberdayaan atau *empowerment* berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam” yang dapat diperkuat dengan unsur-unsur dari “luar”. Dalam kajian ini konsep pemberdayaan dimaknai sama dengan empowerment.

Latar belakang munculnya konsep pemberdayaan ini tidak lain dikarenakan adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara yang terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan, posisi sentral negara terlihat mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaan pembangunan (Soetrisno, 1995 : 135). Paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. Salah satu kritik yang dikemukakannya adalah bahwa paradigma ini tidak mempercayai kekuatan yang ada pada masyarakat khususnya dalam membangun dirinya sendiri. Akibat dari adanya konsep dan pendapat seperti ini, maka hal ini menjadi penghambat utama untuk timbulnya

kearifan lokal sebagai unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan yang ada pada masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara untuk menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif.

Dengan melihat beberapa pendapat tersebut di atas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah, atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang oleh Chambers (1995:134) dicirikan oleh *people centered*, *partisipatory*, *empowering* dan *sustainable*. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi serta daya untuk mengembangkan dirinya ke arah lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia selalu bersifat aktif untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan dirinya.

1. Pemberdayaan dan strategi pembangunan

Konsep pemberdayaan sebagai suatu strategi pembangunan mempunyai makna lebih luas dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, atau menyediakan mekanisme untuk mencegah terjadinya proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), tetapi berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Melihat pendapat tersebut di atas, maka konsep ini tidaklah bertentangan antara strategi pertumbuhan dan pemerataan, namun strategi ini berusaha untuk mensinergikan keduanya, dimana konsep ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan, akan tercipta landasan yang lebih luas untuk terjadinya pertumbuhan, serta memungkinkan adanya pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Pemberdayaan sebagai paradigma atau strategi pembangunan mempunyai bias dalam aplikasinya, Kartasasmita (1996:72) mengidentifikasi paling sedikit ada lima hal, di antaranya :

1. Adanya kecenderungan berpikir bahwa rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting

dari pada dimensi kelembagaan, dan dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosialnya.

2. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna dari pada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (*grass root*), akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kehidupan nyata yang ada di masyarakat.
3. Bahwa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material dari pada keterampilan dan manajerial.
4. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang ada dan berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang efektif, bahkan menghambat proses pembangunan sehingga tidak perlu diikutsertakan.
5. Bahwa lapisan masyarakat di tingkat bawah tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya oleh karena itu mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun menyangkut dirinya sendiri.

2. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan ini dilakukan melalui tiga arah :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan akses kepada berbagai peluang yang mampu mengaktualisasikan masyarakat.
- c. Memberdayakan, mengandung arti melindungi dalam proses pemberdayaan harus dicegah terciptanya kondisi jika pihak yang lemah

akan menjadi semakin lemah, karena ketidak berdayaannya. (Kartasmita, 1996: 74)

Kemudian Mubyarto (1998:26) menyatakan bahwa:

“Praktek pemberdayaan masyarakat adalah lebih berupa tindakan-tindakan yang konkrit dapat meningkatkan kemampuan (kualitas) sumber daya manusia. Selain itu praktek pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, kultur, maupun hukum”.

Dengan demikian untuk pemeratakan pembangunan dalam bidang ekonomi maka perlu adanya pemihakkan pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan dia atas berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu :

- a. Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
- b. Mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar yang mampu menciptakan peluang kerja (Sumodiningrat, 1998:32).

Dan untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar dan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha. Hal ini terkait pula dengan penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha yang memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat.

Menurut Kartasmita (1996:104) agar pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat terealisasikan, diperlukan dua persyaratan pokok, yaitu :

1. Perencanaan pembangunan, yaitu dimana perencanaan pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan dan strategi ini megarah pada tiga arah, meliputi :
 - a. Pemihakkan dan pemberdayaan masyarakat

- b. Pemantapan otonomi
 - c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal
2. Pelaksanaan program pembangunan, dimana pelaksanaan pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat ini memiliki ciri antara lain :
- a. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat lemah.
 - b. Pelaksanaanya harus dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan.
 - c. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja secara sendiri akibat kekurang-kurangannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (cooperatif) dan peran serta dari berbagai pihak.
 - d. Menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membangun dalam rangka kesetiakawanan sosial, yang dimaksud di sini juga meliputi bantuan dari pihak-pihak yang mampu dan telah lebih dulu maju seperti sektor swasta dan juga termasuk peran dari LSM, perguruan tinggi.

3. Pendekatan Pemberdayaan

Berdasarkan hal di atas maka dikembangkanlah berbagai pendekatan, yang mungkin dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yang antara lain :

- a. Upaya pemberdayaan yang terarah atau pemihakan kepada yang lemah.
- b. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan dalam pemecahan masalah secara bersama-sama.
- c. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping (pendamping lokal, teknis, dan khusus). Yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membentuk kelompok mencari solusi atas masalah yang dihadapi. (Kartasmita, 1996:107)

Sementara menurut Suprpto (2000:79), konsep pemberdayaan apabila dikaji lebih mendalam terdapat muatan dasar yang terdiri dari :

- a. *Growth Strategy*, dimana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada strategi pembangunan dengan perhitungan GNP dalam menilai keberhasilan suatu negara.
- b. *Employment Program*, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja.
- c. *Basic need strategy*, yang lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Charles Elliot dalam Suprpto (2000:80) pemberdayaan atau *empowerment* dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

a. *The Welfare State*

Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

b. *The Development Approach*

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

c. *The Empowerment Approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan serta melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Dengan adanya proses pemberdayaan, masyarakat tidak lagi hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. Sehingga hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu dari yang hanya sebagai obyek pembangunan menjadi subyek atas pelaksanaan pembangunan.

Melihat beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan, serta menswadayakan

masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif agar harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi pranata yang ada dan hidup dalam masyarakat perlu dan harus diberdayakan. Melalui strategi pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase (Pranarka dan Prijono, 1996:2) yaitu :

1. *Fase Inisiasi* adalah bahwa semua proses pemberdayaan berawal dari pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat. Masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
2. *Fase Partisipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
3. *Fase Emansipatoris* adalah bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sendiri sehingga dapat dilakukan dalam menganktualisasikan dirinya.

Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri (fase emansipatoris).

C. Kajian Teoritis Tentang Teknologi

1. Teknologi Penunjang Pembangunan dan Perekonomian

Teknologi merupakan variabel penting di dalam strategi pembangunan. Hampir setiap permasalahan dalam pembangunan ekonomi mengarah pada

masalah teknologi. Seperti yang dikemukakan Habibie yang dikutip Juoro, (1998:65)

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sinambung dalam jangka panjang tidak dapat hanya mengandalkan investasi modal dan ketersediaan tenaga kerja saja, tetapi membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan lain yang intinya bersumber pada kemampuan teknologi dan SDM. Sumber-sumber ini sangat menentukan kemampuan tenaga kerja kita untuk lebih produktif.”

Pengembangan teknologi di suatu negara secara garis besar menempuh dua jalur, yang pertama impor secara langsung dari negara-negara maju, dan kedua, mengembangkan teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah ada pada masyarakat.

Teknologi yang diimpor dari negara-negara maju sering tidak menjadi dapat tepat guna terhadap faktor-faktor yang terkandung dalam negara penerima, dan menciptakan permasalahan pengangguran dan ketimpangan. Sementara pihak penerima menginginkan teknologi yang meningkatkan rasio tenaga kerja-modal, dan diharap pada waktu yang efisien yang dapat mengembangkan inovasi yang diinginkan.

Di lain pihak dari berbagai pengalaman pembangunan muncul kebutuhan terhadap teknologi tepat guna dengan ukuran yang lebih kecil, lebih padat karya, lebih mungkin untuk dikuasai dan diperbaiki, lebih sesuai kemampuan pengelolanya, dan lebih harmonis baik ekologi maupun kultur setempat. Pengembangan teknologi jenis ini terutama diarahkan langsung kepada kelompok sasaran golongan miskin di pedesaan.

Banyak teknologi yang diperkenalkan tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang lebih luas. Dalam kondisi masyarakat di mana kesenjangan antara yang kaya dan miskin cukup besar, selayaknya teknologi patutnya lebih bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan golongan miskin. Untuk itu pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan, tentunya di sini pengembangan teknologi sangat dibutuhkan.

Jika kita amati proses pengembangan saat ini memperlihatkan kecenderungan kurang terkontrol, meningkatnya polusi, kurangnya proses seleksi karena minimnya proses proteksi, samarnya prioritas dan semua itu menghasilkan pengaruh buruk pada masyarakat. Oleh karena itu pengembangan teknologi sangat membutuhkan perhatian, dan penyusunannya harus sesuai dengan penerimaan

masyarakat (*social acceptable*). Hal ini memunculkan pengelolaan teknologi yang lebih baik, sehingga menciptakan apa yang dikenal dengan teknologi tepat guna.

Teknologi tepat guna bukan hanya merupakan suatu eufemisme yang meyakinkan kita untuk mengadopsi kemampuan teknik rendah. Istilah teknologi tepat guna mengacu kepada perencanaan dan pendayagunaan proses dari organisasi-organisasi kerja yang sesuai dengan kondisi-kondisi khusus, baik ekonomi maupun sosial suatu daerah. Penggabungan teknologi modern yang padat karya dengan teknologi primitif atau tradisional yang terkontrol dalam penerapannya dapat menjadi tepat guna bagi daerah-daerah yang kondisinya sangat berlainan satu dengan yang lain.

Sampai sejauh ini usaha untuk menggantikan metode-metode dan peralatan tradisional dengan teknologi impor disektor pedesaan tampak kurang berhasil dan malahan sering menimbulkan hambatan-hambatan sosial serta tidak efisiennya operasi karena inovasi-inovasi yang diperkenalkan banyak tidak sesuaiannya dengan dengan kebutuhan lokal dan pola-pola kultural.

Dengan memperbaiki metode-metode dan peralatan-peralatan tradisional lewat prinsip-prinsip ilmiah yang sederhana, membawa kemungkinan perbaikan di dalam efisiensi, peningkatan produksi, dan mengurangi hambatan-hambatan kultural.

Dalam pengembangan teknologi kita jangan hanya terpaku pada cara-cara yang modern maupun yang tradisional ataupun gabungan keduanya, tetapi juga diimbangi dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang disusun dalam keterpaduan dengan struktur-struktur ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya. Konsekuensinya perumusan kebijaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didekati melalui analisa sistem yang melibatkan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem produksi, sistem pendidikan dan sistem politik.

2. Problema Pengembangan Teknologi

Proses pengembangan teknologi merupakan masalah yang mendalam dan kompleks. Telah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa keuntungan-keuntungan dari transfer teknologi hanya dapat dinikmati sebagian kecil

masyarakat dan sedikit sekali bahkan mungkin tidak mungkin mendatangkan keuntungan bagi mereka yang masuk golongan miskin (Juoro,1985:137).

Seperti halnya pengalaman negara-negara industri yaitu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumentasi utama pembangunan ekonomi maka, kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga ditujukan untuk pembangunan ekonomi. Tentunya ini tidak mudah, karena pengembangan teknologi, tidak dapat lepas dari transfer teknologi, di mana di satu pihak inheren dengan kekompleksan proses inovasi teknologi itu sendiri dan di lain pihak terkait dengan pola-pola pemilikan teknologi modern dari perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional yang berpusat di negara-negara industri. Salah satu kesulitan utama adalah masalah penyediaan modal. Lebih-lebih teknologi yang dikembangkan di negara-negara industri ditekankan pada pengembangan produktivitas tenaga kerja, sehingga bersifat padat modal dan energi. Sedangkan kondisi di negara kita pengangguran dan setengah pengangguran ada dalam tingkat yang tinggi, sehingga kehadiran teknologi yang padat modal kurang diharapkan. Lebih jauh lagi teknologi modern yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan transnasional terkait dengan investasi modal asing yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Hal ini menyulitkan pengembangan kemampuan teknologi dalam negeri yang bersifat lebih tepat guna. Kesulitan lainnya dalam proses transfer teknologi adalah kurang tersedianya skill memadai yang harus disediakan lewat suatu ketepatan pengembangan dan dukungan sistem pendidikan. Harus kita akui secara kuantitas lumayan tetapi secara kualitas pendidikan di negara kita masih jauh dari memadai, dan pengembangannya memerlukan proses dalam jangka waktu yang panjang serta memerlukan dukungan sumber-sumber yang diperlukan. Perlu ditambahkan kurangnya latihan-latihan teknik menengah maupun tinggi. Kesulitan lainnya adalah dalam penyediaan infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Kebutuhan Teknologi Yang Tepat Guna

Pola pengembangan atau yang lebih tepatnya transfer teknologi dilakukan oleh negara sedang berkembang yang pada mulanya membawa berbagai harapan, akhir-akhir ini menimbulkan berbagai pertanyaan akan relevansinya terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan karena

hilangnya kepercayaan terhadap teknologi sebagai penunjang utama pembangunan, tetapi karena makin meningkatnya pengertian-pengertian yang lahir dari berbagai pengalaman bahwa pengembangan teknologi tergantung kepada institusional, ekonomi, sosial, dan ekologi di mana suatu teknologi di introduksikan. Dan bahwa kebijaksanaan pemerintah, keadaan pasaran, hambatan-hambatan institusional dan sosial sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan teknologi sebagai suatu aktivitas dari lembaga formal yang berurusan dengan pengembangannya. Sehingga masyarakat lebih membutuhkan teknologi yang lebih mungkin untuk dikuasai dari pada teknologi canggih yang mungkin masyarakat belum bisa meyerap teknologi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Juoro (1985:163) :

“Meningkatnya pengertian dari pengaruh pengembangan teknologi, membawa kepada pemikiran-pemikiran dibutuhkan teknologi yang bersifat tepat guna dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih padat karya, lebih mungkin untuk dikuasai dan diperbaiki, lebih sesuai dengan kemampuan pengelolaannya, dan lebih harmonis baik ekologi maupun kultur setempat oleh negara berkembang daripada teknologi yang dikembangkan di negara-negara maju”.

Munculnya kebutuhan baru terhadap teknologi yang lebih tepat guna merupakan aspek revisi pemikiran pembangunan yang mementingkan GNP melalui transfer teknologi, menjadi peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan serta produktivitas golongan miskin. Penekanan baru terhadap tugas dan jaminan bahwa teknologi dapat memberikan manfaat-manfaat langsung kepada golongan miskin merupakan suatu kebijakan teknologi yang relatif muda. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak yang mengharuskan para cendekiawan dan penentu kebijakan untuk melakukan pergeseran-pergeseran strategi pembangunan dari apa yang telah dikembangkan di negara-negara maju. Pergeseran tersebut membutuhkan usaha pencapaian status dan pengembangannya di masa mendatang dalam apa yang dikenal sebagai elemen-elemen ekonomi yaitu pemukiman urban, produksi pangan, penyimpangan, pemasaran, dan pengembangan teknologi. Untuk itu dibutuhkan analisa dalam horison waktu yang jauh dan pengamatan terhadap aspek-aspek ekonomi, teknologi, kultural, dan sosiologi secara mendetail.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alih teknologi tidak hanya memindahkan teknologi dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu tempat ke tempat lain, dan juga bukan hanya berupa peyampaian informasi-informasi saja, tetapi merupakan transplantasi dari suatu lingkungan ke lingkungan lain dengan metodologi ilmiah dan data-data operatif yang berbeda. Pada hakekatnya alih teknologi adalah merupakan pertumbuhan organis yaitu memperkuat dan mengembangkan kemampuan teknologi masyarakat dengan bertolak dari lingkungan sosial, ekonomi, geografis, dan budaya mereka sendiri (Juoro, 1985:61). Oleh karena itu keberhasilan alih teknologi lebih sebagai problem manusianya.

Pengalihan teknologi dilakukan dari masyarakat di negara lain di mana kemampuan dalam mengasimilasi dan reproduksi, motivasi sosial, kebanggaan terhadap kebudayaan asli, dan kreativitas masyarakat merupakan landasan dasar bagi perkembangannya. Berkembangnya kemampuan teknologi tidak memandang apakah daerah yang bersangkutan kaya akan sumber daya alam atau memiliki modal yang besar, tetapi bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Dengan kekayaan alam yang minim begitu juga modal, suatu daerah dapat dapat mengembangkan kemampuan teknologinya dengan mengandalkan dan bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat terbatas kemampuan modalnya, sehingga sulit mendapatkan tingkatan kemampuan teknologinya khususnya di dalam memproduksi peralatan. Dalam kondisi demikian, maka arah dari usaha mengembangkan teknologi yang tepat adalah memprioritaskan peningkatan kualitas kerja ketimbang peningkatan kualitas perlengkapan. Usaha yang dilakukan tentunya intensif dan ekstensif meliputi peningkatan kualitas pendidikan dasar sampai pengembangan kualitas pekerja. Pengembangan sumber daya manusia inilah yang dapat menjamin tumbuhnya kemampuan teknologi dalam negeri. Menganggap bahwa sumber daya manusia akan meningkat kualitasnya seiring dengan masuknya berbagai ragam teknologi adalah tidak tepat. Tanpa mempersiapkan manusianya terlebih dahulu maka memasukkan berbagai jenis teknologi tidak lebih dari menggunakan produk-produk teknologi tanpa mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Dalam kondisi

demikian boleh jadi tingkatan teknologi yang masuk sudah sangat rumit, namun tingkat penguasannya belum ada apa-apanya.

Pengembangan sumber daya manusia guna berhasilnya proses alih teknologi tidak dapat lepas sendirian. Berangkat dari pemahaman bahwa alih teknologi berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengembangan sumber daya manusia juga tidak dapat lepas dari masalah-masalah tersebut.

5. Peningkatan Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, dan program pemerintah lain pada intinya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa (Juoro, 1985:136). Penilaian sejahtera sendiri sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara obyektif. Namun, setidaknya indikator yang dipakai di dunia internasional dapat digunakan sebagai tolak ukur, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengetahuan, dan juga pendapatan, ketiga macam acuan ini juga bisa diterjemahkan seperti jumlah angka kematian bayi rendah/harapan hidup, indeks pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan juga indeks daya beli.

D. Program Teknologi Tepat Guna

1. Program Pemerintah

Sebelum membahas tentang program pemerintah maka perlu diketahui dulu tentang program. Arikunto dan Abdul Jabar (2004:2-3) mengemukakan pengertian program, baik secara khusus maupun secara umum. Pengertian program secara khusus, ialah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang. Pengertian program secara umum, yaitu suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan bentuk realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, dilaksanakan dalam proses yang berkesinambungan/berkelanjutan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan peranan sekelompok orang.

Program bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar bangkit motivasi dalam inovasi karena tertarik pada program yang direncanakan.

Dari pengertian di atas maka program pemerintah adalah suatu urutan-urutan kegiatan pemerintah yang mana rencana bentuk realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, dilaksanakan dalam proses yang berkesinambungan/berkelanjutan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan peranan sekelompok orang. Dan program pemerintah bertujuan untuk memecahkan masalah publik/masyarakat dimaksudkan agar bangkit motivasi dalam inovasi masyarakat karena tertarik pada program pemerintah yang direncanakan.

Selain itu program pemerintah dapat diartikan pula sebagai kebijaksanaan pemerintah atau negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jones (1991:46) bahwa “kata kebijaksanaan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud tertentu”. Dengan alasan ini maka kebijaksanaan negara menurut Islamy (1997:18) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari pengertian ini maka, Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat pedesaan. Dan merupakan program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah, dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produktivitas dengan bantuan peralatan tepat guna, baik dalam bidang pertanian, industri maupun peternakan. Sehingga produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan dapat bersaing di pasaran.

2. Program Teknologi Tepat Guna

1. Dasar Hukum

Program ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992, tentang pemasyarakatan dan teknologi tepat guna di pedesaan. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27, tentang petunjuk pelaksanaannya.

Keputusan ini yang dimaksud dengan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah rangkaian kegiatan alih teknologi dalam rangka memperkenalkan, memasyarakatkan, mengembangkan dan menerapkan berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna di daerah.

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bersifat dinamis, sesuai dengan kemampuan, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah.

2. Tujuan

Dalam kebijaksanaan ini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umumnya adalah untuk membantu meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan melalui pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya.

b. Tujuan Khusus

Kegiatan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna mempunyai tujuan khusus untuk meningkatkan pembangunan pedesaan antara lain :

- 1) membantu masyarakat desa dalam usaha memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui sentuhan serta wujud teknologi tepat guna;
- 2) pemeratakan pembangunan, mempercepat pertumbuhan desa serta meningkatkan pelayanan-pelayanan dasar;
- 3) meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab dalam membangun diri serta lingkungan;
- 4) memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- 5) memanfaatkan, melipatgandakan dan menyebarluaskan penggunaan alat-alat yang dapat dihasilkan dan dipelihara sendiri serta menggunakan teknologi yang lebih maju dikemudian hari;
- 6) meningkatkan kerja sama antar lembaga pemerintah dan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat;
- 7) meningkatkan kelompok-kelompok informasi yang sudah ada di desa/ kelurahan dalam suatu bentuk pelayanan informasi teknologi tepat guna.

3. Strategi

Pemanfaatan teknologi tepat guna dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan produksi dan produktivitas serta pendapatan masyarakat;
- b. perluasan lapangan pekerjaan dan usaha masyarakat pedesaan;
- c. pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di pedesaan;
- d. penggunaan prinsip-prinsip pendekatan pengembangan masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat;
- e. peningkatan kerjasama dan keterpaduan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun masyarakat serta berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa;
- f. informasi yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat paling bawah pedesaan.

4. Sasaran

Sasaran pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

- a. kawasan pedesaan yang mempunyai permasalahan khusus dalam pengembangannya dan atau kawasan yang potensial namun belum atau kurang berkembang;
- b. petani, nelayan, pemuda-pemudi putus sekolah, tenaga penganggur, setengah penganggur dan ibu rumah tangga;
- c. menumbuhkembangkan informasi teknologi pedesaan agar dapat memberikan pelayanan yang menjangkau kelompok sasaran masyarakat paling bawah pedesaan;
- d. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian pemerintah dan non pemerintah dan Demonstrasi Plot, stasiun-stasiun percobaan ataupun Laboratorium Site (LAB Site).

5. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna:

- a. inventarisasi berbagai jenis dan bentuk teknologi tradisional, yang bisa ditingkatkan dan memberi nilai tambah kepada usaha perekonomian masyarakat serta perbaikan kualitas hidupnya;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui latihan dan meningkatkan keterampilan dan wawasan teknologi tepat guna kepada aparatur, petugas lapangan serta kelompok-kelompok masyarakat.
- c. mempersiapkan pelatih keliling teknologi tepat guna dari sektor-sektor dan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat di lapangan yang mau dan mampu kerja di lingkungan masyarakat pedesaan antara lain: para Kader Pembangunan Desa (KPD), Tenaga Kerja Suka Rela Terdidik (TKST) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3);
- d. mengembangkan keanekaragaman (diversifikasi) usaha masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan tangan, bahan bangunan, perbengkelan, serta sektor penunjang kebutuhan dasar manusia;
- e. melaksanakan pelayanan berbagai jenis teknologi tepat guna melalui media komunikasi, media cetak, media elektronik, pameran/ peragaan pembangunan sesuai tipologi wilayah dan permasalahannya.

6. Perencanaan

a. Penelitian/kerjasama

Dalam rangka perencanaan program pemasyarakatan teknologi tepat guna di pedesaan perlu dilakukan penelitian/kerjasama dengan perguruan tinggi lembaga pemerintah non departemen dan dinas teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keamanan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang teknologi tepat guna dan membantu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa.

b. Inventarisasi dan Identifikasi

Inventarisasi dan identifikasi jenis dan spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat melalui proses penyusunan data dan pengolahan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran potensi desa dalam hal sumber daya alam, manusia dan keadaan lingkungannya, mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, mengetahui

berbagai jenis teknologi yang ada di masyarakat serta melihat kemungkinan untuk dikembangkan, mengetahui keadaan kelembagaan yang ada dan mencari peluang untuk pemanfaatannya.

c. Pelatihan

Dengan ditemukan/diketahui jenis dan spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam upaya memperkenalkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna tersebut perlu dilakukan pelatihan dan menyusun modul-modul teknologi tepat guna agar mudah diterima dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Pelatihan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan uji coba peralatan tersebut dan menyiapkan instruktur.

d. Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan kunjungan peninjauan desa serta menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari laporan yang diterima.

7. Pelaksanaan

a. Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dilaksanakan melalui :

1) Pelatihan

Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna dilaksanakan/diperuntukkan bagi aparat, perorangan, keluarga, organisasi, dan masyarakat pemakai. Materi yang akan diberikan adalah teknis pembuatan peralatan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi, tipologi desa, kondisi sosial budaya/mata pencaharian masyarakat.

Peserta pelatihan adalah aparat pengelola teknologi tepat guna di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan khususnya di jajaran pembangunan masyarakat desa, sarjana pendamping desa tertinggal, KPD, kader teknis, pengurus LKMD, tokoh masyarakat, LSM, dan lain-lain.

2) Penyuluhan

Penyuluhan kepada masyarakat, menyebarluaskan buku-buku/modul teknologi tepat guna, peragaan, pameran, pemberian informasi, dan data jenis-jenis peralatan teknologi tepat guna melalui media cetak maupun elektronik.

3) Mengikutsertakan peran swasta dalam memproduksi peralatan teknologi tepat guna yang berupa perangkat keras (*hardware*) maupun *prototype* (bentuk mini), menciptakan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

4) Kerjasama melalui program/kegiatan koordinasi, AMD, Latsirtada, AKABRI, lomba PKK, KKN, dan lomba desa.

5) Pengembangan dan penyebarluasan teknologi tepat guna dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan teknis, pemberian informasi, dan pemasaran jenis dan spesifikasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perlu dilaksanakan kerja sama dengan instansi terkait di masing-masing jenjang pemerintahan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena dan tidak sampai pada usaha untuk mempersoalkan hubungan atau korelasi antar variabel yang ada.

Menurut Hasan (2002 : 22) metode deskriptif melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Tujuan menggunakan penelitian deskriptif yaitu :

1. Menyimpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
3. Membuat perbandingan atau evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

Pendekatan kualitatif dipilih karena pertimbangan bahwa peneliti ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai di Kabupaten Malang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa penelitian kualitatif adalah :

“Suatu penelitian yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, menganalisa data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak, yang meneliti dan subyek penelitian.” (Moleong, 2000:27).

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000:3):
“Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang lain dan

perilaku yang dicermati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik”.

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif meliputi:

- a) Latar ilmiah
- b) Manusia sebagai instrument
- c) Metode kualitatif
- d) Analisa induktif
- e) Deskriptif
- f) Lebih mementingkan proses daripada hasil
- g) Teori dasar
- h) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
- i) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data yang bersifat sementara
- j) Hasil penelitian dipilih oleh karena disesuaikan dengan permasalahan yang hendak diangkat, hasil penelitian dengan pendekatan sendiri (Moleong, 2000:6).

Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan realita yang ada secara obyektif, tanpa mengadakan isolasi terhadap obyek pengamatan, sehingga dengan pendekatan ini peneliti dapat mendeskripsikan secara utuh realita atau fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Realita yang ingin digambarkan dalam penelitian ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai” (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan menunjukkan arah dari penelitian, sehingga fokus penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Berdasarkan batas-batas dalam fokus penelitian yang merupakan faktor sangat penting, terutama menyangkut masalah dan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa. Penentuan fokus penelitian menurut Moleong (2000:62) mempunyai dua tujuan yaitu :

- 1) Membatasi studi, dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inkuiri, misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
- 2) Memenuhi kriteria inquisi-eksklusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian, seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan. Dengan demikian

secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya hingga menjadi kesimpulan.

Untuk mengetahui gambaran “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Mesin Pemecah Kedelai” (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Masyarakat Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang) maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mesin pemecah kedelai di Kabupaten Malang?
 - a. Persiapan pelaksanaan program
 - b. Proses pelaksanaan program
- 2) Dampak Pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mesin pemecah kedelai sebelum dan sesudah mendapatkan pemberdayaan, yang meliputi :
 - a. Produktivitas
 - b. Pendapatan
 - c. Kesehatan
 - d. Pendidikan dan Pengetahuan
- 3) Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program Pemanfaatan TTG Mesin Pemecah Kedelai?

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, untuk mendapatkan data-data yang valid, akurat yang benar-benar diperlukan untuk penelitian, dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat untuk peneliti melakukan penelitian adalah Kabupaten Malang.

Adapun situs dalam penelitian ini adalah tempat di mana sebenarnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Dengan

demikian, situs penelitian ini adalah pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi. Dalam penelitian situs yang pertama dipilih didasarkan pertimbangan bahwa BPM mempunyai peran yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan situs yang kedua merupakan desa yang mendapatkan bantuan pemberdayaan masyarakat di antaranya yaitu mesin pemecah kedelai karena menjadi pemenang lomba desa antar desa se-Kabupaten Malang. Serta memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penulis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lofland dan Lofland yang dikutip Moleong (2000:12), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (interview) dan pengamatan langsung (observasi). Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif meliputi dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang didapat dari pengamatan sendiri secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara oleh penulis dengan pihak yang memiliki kewenangan, yakni :

- a. Kepala BPM Kab. Malang
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan usaha ekonomi informal dan pendayagunaan teknologi tepa guna.
- c. Kepala bagian Tata Usaha BPM
- d. Kepala Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi
- e. Kaur Ekbang Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi
- f. Masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan masyarakat.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang dapat memperkuat atau mendukung data-data primer seperti data yang bersumber dari dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, situs dalam internet, dokumen-dokumen, dan karya tulis yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan diangkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

1) Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan cara memperoleh data atau informasi dari narasumber dengan melakukan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Pengamatan (observasi)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengamati secara langsung obyek yang diteliti. Menurut Hasan (2002:86), observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengadaan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang memegang peranan penting dalam melakukan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data di lapangan. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2000:4) mengemukakan bahwa “instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri”.

Jadi dalam penelitian ini instrumen yang dipakai adalah:

1) Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrumen utama (instrumen guide) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian ini.

2) Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.

3) Catatan Lapangan (Field Note)

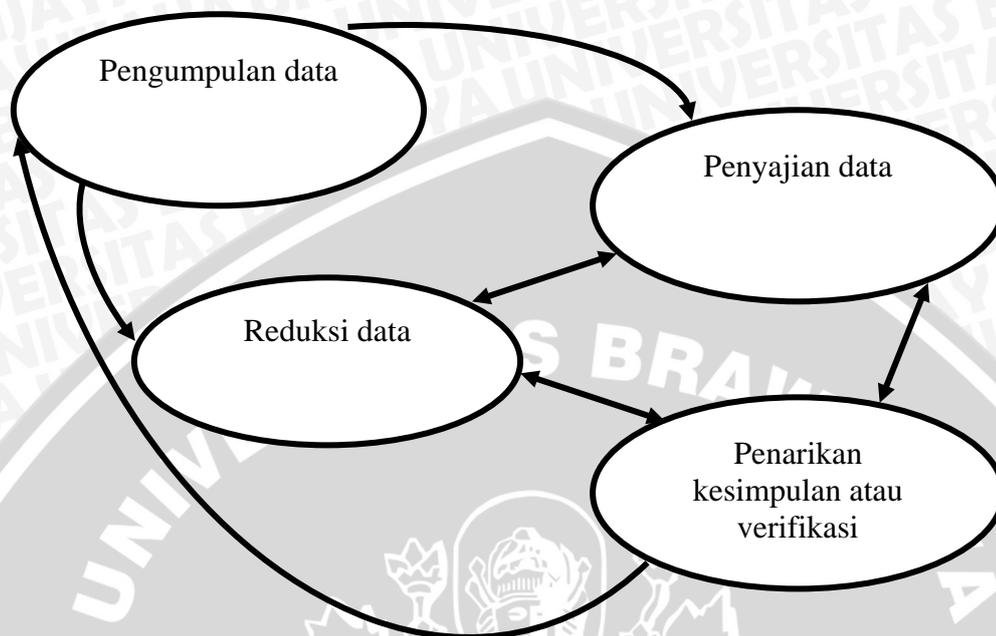
Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

D. Analisis Data

Menurut Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong (2000:103), analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana setelah data yang terkumpul tersebut diolah, kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian atas data tersebut.

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles dan Huberman (1992:20) bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan sebagai berikut:

Gambar 1
Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1999:20)

1) Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan penulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan tersebut kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh. Kemudian dari data itu dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian yang akan diangkat. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun.

2) Penyajian Data

Penyajian data (display data) dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang

harus kita lakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. Adapun bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk teks uraian.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan (Verifikasi data) dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam bab ini akan disajikan berbagai data yang telah didapatkan selama penelitian didukung oleh berbagai paparan baik dalam bentuk kalimat-kalimat maupun data tabel yang nantinya akan dianalisa. Beberapa data tersebut antara lain gambaran umum lokasi penelitian baik Desa Urek-urek maupun kantor BPM, untuk Desa Urek-urek disertai data tentang keadaan geografis maupun keadaan penduduk dan deskripsi tentang lokasi penelitian yang bersifat memperjelas penggambaran.

Kemudian disajikan tentang pelaksanaan Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai dimulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir dari pelaksanaannya. Selanjutnya adalah tentang dampak program tersebut terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat desa, dan faktor pendorong dan penghambat dari program tersebut.

1. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

a) Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat

b) Susunan Organisasi

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - d) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat
 - b) Sub Bidang Aparatur Pemerintah Desa / Kelurahan
 - c) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan

4. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c) Sub Bidang Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan
5. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Anak dan Remaja
 - c) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Bantuan Pembangunan
 - b) Sub Bidang Perkreditan
 - c) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
7. Bidang Pemberdayaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Desa, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna
 - b) Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna
 - c) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Desa
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c) Visi & Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat mandiri dan aparatur profesional yang berwawasan luas dan demokratis.

Misi

1. Mewujudkan aparatur pemdes/kelurahan yang mampu melayani masyarakat dan meningkatkan peran serta fungsi lembaga pemerintahan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber kekayaan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Meningkatkan peranan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan manajemen perencanaan pembangunan desa sebagai alat ukur / evaluasi hasil pembangunan desa/kelurahan.

3. Melestarikan usaha sosial budaya masyarakat dan swadaya gotong royong, peningkatan peranan perempuan serta pembinaan anak dan remaja.
4. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi desa dengan menggali potensi ekonomi, membentuk lembaga-lembaga perkreditan desa, ekonomi keluarga dan masyarakat serta menyalurkan bantuan pembangunan.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) & sumber daya desa melalui pengkajian, kerja sama teknologi dan pemanfaatan sumber daya desa.

d) Tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Visi Pemberdayaan Masyarakat. **Terwujudnya masyarakat mandiri dan Aparatur Pemerintahan Desa yang profesional, berwawasan luas dan demokratis.** Maka tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam proses pembangunan yang merupakan mitra kerja pemerintahan desa.
- c. Melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada didalam masyarakat sebagai ciri khas bangsa Indonesia untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Meningkatkan peranan wanita dalam proses pembangunan melalui pembangunan keluarga sejahtera, upaya perlindungan terhadap hak-hak wanita serta kemitra sejajaran.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi keluarga dan masyarakat, dengan pemanfaatan sumber daya desa maupun menggunakan teknologi tepat guna sebagai upaya transformasi teknologi yang ramah lingkungan.

2. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kelembagaan masyarakat baik lembaga pemerintah desa dan BPD sebagai wadah demokrasi perwakilan maupun lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Rukun Warga/RW serta Rukun Tetangga/RT) sebagai wadah demokrasi partisipasi.
- b. Mempertahankan nilai-nilai kegotong-royongan, tradisi dan adat-istiadat yang ada di masyarakat.
- c. Meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- d. Meningkatkan laju perkembangan desa dari kurang berkembang, lamban berkembang, menjadi berkembang dan cepat berkembang pada setiap tahunnya selalu diupayakan meningkat.
- e. Meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan sesuai kemampuan yang ada pada mereka dengan pengembangan kelembagaan organisasi perempuan.
- f. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dengan pemanfaatan bantuan-bantuan program pengurangan subsidi BBM.
- g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat pedesaan.
- h. Berkembangnya Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan.

e) Tugas Pokok

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pemberdayaan masyarakat
2. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

f) Fungsi

1. Perumusan pengkoordinasian kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan



2. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah Desa dan Kelurahan
3. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan masyarakat
4. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosial budaya masyarakat
5. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan kelompok masyarakat
6. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat
7. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya desa
8. Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
9. Pengkoordinasian penyusunan program dan pengembangan bahan-bahan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat
10. Pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
11. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan prasarana dan sarana.

g) Kepegawaian

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang sebanyak 50 Orang dengan rincian edukatif sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

No.	Jabatan	Pendidikan							JML
		SD	SLTP	SMU	SMK	SAR-MUD	S1	S2	
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris *	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	1	1	-	4
5.	Kepala Sub Bidang	-	-	-	1	3	11	-	15
6.	Staf	4	-	14	2	2	3	-	25
	Jumlah	4	-	14	5	6	19	2	50

Sumber : Kantor BPM Kabupaten Malang

* Ket. : Jumlah pegawai 50 orang karena posisi sekretaris di rangkap oleh Kepala Sub Bag Umum



Dari tabel I Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai di kantor BPM sebgaaian besar adalah sarjana dengan klasifikasi S2 = 2 Orang, S1 = 19 Orang, Sm = 6 Orang, SMU = 14 Orang, SMK = 5 Orang. Dan yang berpendidikan dibawah SMU hanya ada 4 Orang, dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi pendidikan, SDM di Kantor BPM termasuk cukup tinggi.

Tabel 2
Pendidikan Penjenjangan Pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

No.	Jabatan	Penjenjangan					Jml
		Adum	Adumla	Spama	Spamen	Spati	
1.	Kepala BPM	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala bid	-	-	4	-	-	4
4.	Ka Subid	5	9	-	-	-	14
5.	Ka Subag	1	1	-	-	-	2
6.	Staf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	10	5	1	-	22

Sumber : Kantor BPM Kabupaten Malang

2. Eselonisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan eselon 2-b membawahi Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang dengan eselon 3-a.

Sekretaris membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan eselon 4-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dengan eselon 4-a, selengkapnya sebagaimana table berikut :

Tabel 3
Eselonisasi Pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Malang

No.	Eselon	Pangkat					Jml	Ket.
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b		
1.	2-b	-	-	-	-	1	1	
2.	3-a	-	-	3	2	-	5	
3.	4-a	6	13	-	-	-	19	
Jumlah		6	13	3	2	1	25	-

Sumber : Kantor BPM Kabupaten Malang

Dari tabel III dapat dilihat pembagian eselon di Kantor BPM sudah hampir merata.

3. Masa Kerja Pegawai

Tabel 4
Masa Kerja Pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Malang

No.	Masa kerja	Jumlah	Keterangan
1.	0 s/d 5 Tahun	5 orang	-
2.	5 s/d 10 Tahun	15 orang	
3.	10 s/d 15 Tahun	5 orang	
4.	15 s/d 20 Tahun	7 orang	
5.	20 s/d 25 Tahun	15 orang	
6.	25 s/d 30 Tahun	3 orang	
Jumlah		50 orang	

Sumber : Kantor BPM Kabupaten Malang

h) Permasalahan

1. Letak kantor yang jauh dari pusat pemerintahan dan domisili pegawai sebagian besar di kota Malang, menyebabkan tingkat disiplin menurun karena biaya transportasi berlipat.
2. Kurangnya sarana kerja yang dimiliki para petugas lapangan berupa kendaraan dinas.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Urek-urek

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Gondanglegi berada dalam wilayah Kabupaten Malang, dimana pusat pemerintahan Kecamatan Gondanglegi berjarak 6 km dari Desa Urek-urek dan 23 km dari Kota Malang.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Gondanglegi terdiri atas 14 desa. Dan Desa Urek-urek merupakan salah satu dari 14 desa tersebut. Desa urek-urek berjarak 6 km ke arah utara dari pusat pemerintahan Kecamatan Gondanglegi. Sementara dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang yaitu Kepanjen adalah 10 km. Sedangkan batas-batas wilayahnya adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sudimoro Kec. Bululawang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Putatlor
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ketawang
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jeru Kecamatan Turen

Dengan luas 491,77 Ha Desa Urek-urek memiliki beraneka ragam hasil bumi yang menopang sebagian besar kebutuhan masyarakat. Desa Urek-urek sebagian besar lahannya digunakan untuk sawah dan ladang yang menghasilkan padi dan palawija, buah-buahan dan hasil lainnya berupa tebu, jagung dan kedelai. Selanjutnya untuk lebih jelasnya penggambaran pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Pola Penggunaan Tanah
Desa Urek-urek 2005/2006

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Pemukiman /perumahan	79	16,06
2.	Sawah	199	40,5
3.	Ladang	198	40,3
4.	Perkantoran	0,5	0,1
5.	Sekolah	1	0,2
6.	Jalan	0,87	0,18
7.	Lain-lain	13,4	2,7
Jumlah		491,77	100

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

b. Keadaan Iklim

Secara umum wilayah Desa Urek-urek beriklim tropis sebagaimana daerah di Indonesia lainnya. Dengan ketinggian 335m di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki suhu rata-rata minimum 23° C dan Maksimum 32° C. Sementara curah hujan rata-rata 1865 mm per tahun.

Dalam wilayah desa Urek-urek terdapat dua musim dalam setahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April sampai dengan bulan September, sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret.

Dengan kondisi iklim yang demikian maka Desa Urek-urek termasuk daerah yang subur dan sangat potensial untuk pertanian, sehingga hal ini dapat mendukung produksi tanaman pertanian dan perkebunan yang merupakan sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Desa Urek-urek.

c. Keadaan Penduduk

1) Menurut Usia

Dengan luas wilayah 491,77 Ha Desa Urek-urek dihuni oleh 6.840 orang, yang terdiri atas 3103 orang laki-laki dan 3737 orang perempuan. Dari sejumlah ini terdapat 1640 kepala keluarga (KK).

Dari jumlah penduduk yang ada kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok pendidikan dan tenaga kerja.

a) Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk menurut usia kelompok pendidikan jumlah terbesar adalah pada usia 19 tahun keatas, yaitu 4612 jiwa atau 67,4% atau separo lebih dari seluruh jumlah penduduk menurut usia pendidikan. Sedangkan jumlah terkecil adalah kelompok umur 4-6 tahun yaitu sebesar 317 jiwa atau 4,6% dari seluruh penduduk menurut usia sekolah.

Tabel 6
Komposisi Penduduk Menurut Usia Pendidikan
Desa Urek-urek 2005-2006

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	0 - 3	394	5,76
2.	4 - 6	317	4,6
3.	7 - 12	699	10,2
4.	13 - 15	340	4,97
5.	16 - 18	478	6,99
6.	>19	4612	67,4
Jumlah		6840	100

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

b) Kelompok Tenaga Kerja

Komposisi penduduk terbesar menurut kelompok tenaga kerja adalah kelompok umur 27 – 40 tahun dengan jumlah 1355 orang atau 25,9% dari seluruh jumlah penduduk menurut usia tenaga kerja. Sedangkan jumlah terkecil untuk usia tenaga kerja adalah > 57 tahun dengan jumlah 203 orang atau 3,9% dari seluruh jumlah penduduk menurut usia tenaga kerja. Berikut ini tabel komposisi penduduk menurut usia kerja :

Tabel 7
Komposisi Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja
Desa Urek-urek 2005-2006

No.	Umur (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	10 - 14	626	11,97
2.	15 - 19	762	14,5
3.	20 - 26	1015	19,4
4.	27 - 40	1355	25,9
5.	41 - 56	1267	24,2
6.	>57	203	3,9
Jumlah		5228	100

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

c) Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum sebagian besar masyarakat Desa Urek-urek memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah. Bahkan, ada banyak penduduk yang belum pernah mengikuti pendidikan formal atau tidak dapat meneruskan pendidikan karena sebab-sebab tertentu, misalnya keterbatasan biaya, kesadaran akan pentingnya pendidikan kurang, jauhnya tempat sekolah, membantu orang tua bekerja di sawah, dan sebab-sebab yang lainnya.

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang paling besar jumlahnya yaitu mereka yang menamatkan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 2586 orang. Golongan penduduk terbesar kedua adalah masyarakat yang belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar yang berjumlah 2495 orang. Sedangkan penduduk yang jumlahnya paling sedikit dilihat dari segi pendidikannya adalah penduduk yang menamatkan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yaitu berjumlah 9 orang dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Berikut ini adalah tabel komposisi penduduk dilihat dari segi pendidikannya.

Tabel 8
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Urek-urek 2005-2006

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Penduduk tidak Tamat SD	2495
2.	Penduduk Tamat SD/ sederajat	2586
3.	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	498
4.	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	193
5.	Penduduk Tamat D1-D3	19
6.	Penduduk Tamat S1	9

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

d) Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Urek-urek seperti halnya kebanyakan desa-desa yang ada di Indonesia bermatapencaharian sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil pertanian. Karena hal ini didukung oleh keadaan tanah Desa Urek-urek yang subur, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam. Mayoritas penduduknya menggunakan tanahnya untuk areal

persawahan dan perkebunan yang menghasilkan padi, tebu, jagung, kelapa, palawija, dan kedelai.

Selain berprofesi sebagai petani, ada beberapa orang yang memilih berprofesi di bidang industri rumah tangga. Industri rumah tangga yang ada di Desa Urek-urek antara lain pembuat genting rumah, pembuat tahu dan tempe. Sedangkan yang lain bekerja di bidang perdagangan dan jasa, serta ada sedikit orang yang menjadi pegawai negeri sipil. Jadi sebagian besar Masyarakat Desa Urek-urek Mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Urek-urek 2005-2006

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	PNS	9	0,24
2.	ABRI	3	0,08
3./	Industri	26	0,7
4.	Pedagang	370	10,2
5.	Tani	1648	45,4
6.	Pertukangan	25	0,69
7.	Buruh Tani	1526	42,06
8.	Pensiun	6	0,2
9.	Jasa	15	0,4
Jumlah		3628	100

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

Untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dibutuhkan sarana dan prasarana, Desa Urek-urek memiliki sarana dan prasarana yang lengkap mulai dari sarana komunikasi, informasi, dan transportasi desa sudah tersedia. Untuk sarana komunikasi di wilayah Desa Urek-urek memiliki 3 wartel, pesawat telepon pribadi (rumah tangga) ada 124 buah atau sekitar 7,5% dari seluruh KK yang ada. Untuk sarana informasi 1374 KK atau 84% dari seluruh KK penduduk Desa urek-urek memiliki televisi. Dan alat transportasi untuk menjangkau Desa Urek-urek ada

angkutan Umum (angkutan Pedesaan)/mikrolet dan ojek. Desa Urek-urek memiliki jalan yang sebagian dari jalan desa sudah di aspal meskipun jalannya masih aspal kasar dan sempit, sehingga mudah dilalui oleh mobil maupun sepeda motor.

Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Urek-urek kebanyakan diperoleh di dalam lingkungan sendiri, karena sudah banyak toko dan warung. Selain itu jarak dengan pasar kecamatan juga dekat dan mudah di jangkau hanya berjarak 6 km.

Untuk masalah sosial seperti kesehatan Desa Urek-urek memiliki gedung pos pelayanan terpadu (posyandu) yang dikepalai oleh seorang bidan desa. Sedangkan kegiatan sosial yang lain seperti penyuluhan, pertemuan ibu-ibu PKK desa Urek-urek memiliki gedung yang cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Oleh BPM Kabupaten Malang

a) Persiapan Pelaksanaan Program

Untuk Desa Urek-urek mendapatkan bantuan karena menjadi pemenang lomba desa se-Kabupaten Malang. Jadi setelah Desa Urek-urek ditetapkan sebagai desa penerima bantuan maka tahap persiapan pelaksanaan segera disusun. Adapun tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan dibawah ini yaitu :

1. Inventarisasi dan Identifikasi

Pada tahap ini yaitu mendata potensi yang ada di desa dan permasalahannya. Inventarisasi dan identifikasi di Desa Urek-urek dilakukan oleh Kaur ekonomi pembangunan (Ekbang) dibantu seluruh aparat desa dan usulan dari hasil rapat LPMD dan BPD. Dari potensi-potensi tersebut dipilih mana yang kira-kira bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa memberikan dampak pada masyarakat luas. Sesuai dengan kebanyakan desa potensi yang mudah untuk dikembangkan yaitu pasti berhubungan dengan pertanian serta hasil usaha pertanian. Hal ini didukung oleh sumber daya di desa yang cukup melimpah yaitu tanah dan tenaga kerja yang memadai untuk menggarap tanah pertanian tersebut. Sehingga panen hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik. Hal ini mendorong

masayarakat untuk mengolah hasil pertanian lebih lanjut dijadikan barang yang lebih mempunyai nilai jual yang tinggi dari pada menjual langsung hasil panennya, misalnya bahan olahan seperti tahu dan tempe. Kedelai yang sangat melimpah di desa akan sangat murah jika dijual hanya dalam bentuk kedelai, sebaliknya jika di olah sedikit menjadi tahu dan tempe akan meningkatkan nilai ekonominya.

Untuk industri tahu dan tempe permasalahan yang terjadi yaitu masalah proses pembuatan banyak yang masih menggunakan alat tradisional sehingga memerlukan proses dan waktu yang sangat lama dalam sekali produksi tahu dan tempe. Selain itu masalah yang lain kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe harganya cenderung tidak stabil, hal ini tidak diimbangi oleh pasar yang baik.

Tabel 10
Potensi Desa Hasil Tanaman Palawija
Desa Urek-urek 2005-2006

No.	Jenis Palawija	Luas (Ha)	Hasil Panen Ton /Ha
1.	Kedelai	40	7
2.	Kacang tanah	-	-
3.	Koro bengkok	-	-
4.	Kacang panjang	4	6
5.	Sorgum	-	-
6.	Kacang hijau	-	-
7.	Jagung	80	14
8.	Ubi jalar	3	20
9.	Cabe	1	3,5
10.	Ubi kayu	2	25
11.	Tomat	1	5
12.	Timun	2	9

Sumber : Data Monografi Desa Urek-urek 2005/2006

2. Pembentukan Kelompok Masyarakat

Setelah mengidentifikasi dan menginventarisir potensi Desa Urek-urek, maka data tersebut disampaikan ke kecamatan lalu pihak kecamatan mengirim ke

pemerintah kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada instansi yang terkait dengan program yang akan dilaksanakan yaitu Kantor BPM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dan yang mendapat perhatian yaitu industri rumah tangga pembuatan tahu dan tempe. Setelah itu dibentuklah kelompok yang anggotanya terdiri industri rumah tangga pembuat tahu dan tempe. Dan anggotanya terdiri dari lima (5) kepala keluarga (KK) yang diketuai oleh Bapak Buari. Pembentukan Pokmas ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat baik anggotanya maupun tujuannya. Dan juga siapa diantara mereka yang paling berhak menerima bantuan dari program ini.

3. Pengajuan Proposal

Setelah kelompok Masyarakat terbentuk dan bermusyawarah maka pokmas tersebut harus membuat proposal yang di dalamnya memuat jumlah dari nama anggota, usahanya, permasalahan, dan bantuannya berbentuk apa. Untuk pokmas Desa Urek-urek mengajukan proposal pada awal tahun 2005. Proposal tersebut ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam Proposal tersebut pokmas meminta bantuan peralatan pemecah kedelai sesuai dengan jumlah anggota yaitu 5 buah.

Dan pada akhir tahun 2005 baru ada jawaban dari pemerintah Kabupaten Malang, bahwa proposal yang diajukan tersebut disetujui, tetapi disesuaikan dengan anggaran belanja daerah, akhirnya hanya 2 unit. Penyerahan bantuan peralatan tersebut pada Desember 2005 diserahkan secara simbolik Oleh Drs. Soepriyanto, M.Si dalam acara pelatihan TTG di Wisma Bhaswara Dokdikjur Malang bersama para penerima bantuan dari desa-desa yang lain. Baru satu minggu peralatan dikirim ke kantor desa masing-masing penerima bantuan.

Proposal tersebut disetujui karena alasan bahwa Desa Urek-urek merupakan salah satu pemenang lomba desa se-Kabupaten Malang. Selain itu ketepatan isi dari proposal, kejelasan usaha, juga survey yang dilakukan oleh BPM Kab. Malang bahwa Desa Urek-urek memang layak untuk menerima bantuan Pemberdayaan Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Bambang yaitu Kepala Bidang

repository.ub.ac.id

Pemberdayaan Usaha Informal dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Malang, bahwa :

Proposal dari Desa Urek-urek Disetujui karena desa ini menjadi pemenang lomba desa anatr se-Kabupaten Malang. Juga isi dari proposalnya sangat tepat dan usaha ini mempunyai prospek yang cerah karena Desa Urek-urek mempunyai lahan yang cukup mendukung yaitu lahan yang luas dan ditanami kedelai.

(Wawancara tanggal 18 Juli 2007 Pkl. 10.00 WIB)

b) Pelaksanaan Program oleh BPM Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui TTG Mesin Pemecah Kedelai.

Setelah melalui tahap persiapan awal, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dimana tahap ini meliputi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelatihan

Pelatihan mengenai teknologi tepat guna diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, di mana yang bertugas untuk mengurus masalah ini yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu BPM Kabupaten Malang mengadakan pelatihan TTG bagi Kelompok Masyarakat (POKMAS) pengusaha kecil/industri rumah tangga, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemampuan akan usahanya untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/928/KEP/421.012/2005 tentang Tim pelatih pada pelatihan teknologi tepat guna bagi kelompok masyarakat pengusah kecil/ industri rumah tangga dan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Nomor : 415.2/02/421.205.2005 tentang pembentukan panitia penyelenggaraan pelatihan teknologi tepat guna bagi kelompok masyarakat pengusaha kecil/industri rumah tangga Kabupaten Malang.

Untuk mengadakan pelatihan tersebut BPM Malang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang lain, diantaranya yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang.

Pelatihan ini diikuti oleh aparat desa yang terlibat dan warga desa yang menjadi kelompok sasaran dari program ini. Untuk tempat nya yaitu di

kecamatan-kecamatan yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan dan juga kadang bertempat di balai tertentu. Seperti yang sudah pernah dilakukan yaitu pelatihan TTG ini pada tanggal 19 s/d 21 Desember 2005 di Wisma Bhaswara Dokdikjur Malang, dengan peserta :

1. Desa Duwet Kec. Tumpang
 2. Desa Sukonolo Kec. Bululawang
 3. Desa Purwodadi Kec. Donomulyo
 4. Desa Giri Mulyo Kec. Gedangan
 5. Desa Urek-urek Kec. Gondanglegi
2. Penyuluhan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mesin pemecah kedelai selain diadakan pelatihan juga diadakan penyuluhan. Penyuluhan ini biasanya dilaksanakan setelah serah terima barang oleh BPM kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS). Dan biasanya juga penyuluhan diadakan bersamaan dengan pelatihan hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenalkan tahap awal terhadap alat yang akan diterima oleh kelompok masyarakat dan aparat desa. Serta pengenalan tentang dasar-dasar manajemen pengelolaan usaha, pengendalian mutu, dan lebih teknis mengenai cara kerja alat untuk memproduksi dan perawatannya.

Untuk selanjutnya penyuluhan dilakukan oleh masing-masing desa yang dilakukan seluruh aparat desa dan sebagai penanggung jawab yaitu Kaur Ekonomi Pembangunan (Ekbang). Penyuluhan ini tidak dilaksanakan secara khusus tetapi setiap ada kesempatan seperti rapat-rapat sosial dan rapat antar anggota pokmas.

Hal ini tentunya aparat desa sudah dibekali terlebih dahulu oleh BPM mengenai TTG. Karena desa-desa mendapatkan bantuan buku-buku seri teknologi pedesaan dan seri prasarana desa. Dengan begitu masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi teknologi yang bermanfaat.

3. Pengembangan dan Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna

Untuk mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna dilaksanakan melalui :



a. Mengikuti gelar TTG Nasional

Dalam keikutsertaannya dimaksudkan menambah wawasan dan mempromosikan produk unggulan Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan kelompok sasaran. Selain itu juga bisa dijadikan tukar informasi antar daerah lain yang juga mengikuti gelar TTG nasional jika ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknologi yang mereka bawa. Dengan begitu bisa melengkapi satu sama lain dan membawa pemikiran yang lebih maju sehingga bisa membuat teknologi yang lebih baik.

b. Penguasaan teknologi tepat guna

Penguasaan teknologi tepat guna kepada masyarakat adalah dengan pemberian teori dan praktek pada saat pelatihan. Agar masyarakat lebih menguasai teknologi tepat guna maka hal yang diperlukan adalah memberi kesempatan masyarakat untuk lebih banyak praktek menggunakan alat tersebut dan penyebarannya. Untuk pemakaian peralatan di Desa Urek-urek setelah pengajuan proposal dan disetujui serta bantuan turun pada Desember Desember tahun 2005. Maka setelah itu baru peralatan diserahkan sepenuhnya kepada POKMAS beserta penyebarannya kepada anggotanya. Karena usahanya tidak mempunyai nama usaha maka yang dijadikan dalam mempermudah penyajian data yaitu nama kepala keluarga yang memperoleh bantuan. Berikut ini adalah nama penerima bantuan dari Desa Urek-urek dari beberapa anggota yang memperoleh bantuan ada dua kepala keluarga. Berikut ini adalah nama penerima bantuan tersebut :

1. Buari (ketua)
2. Muajir

Dari lima anggota pokmas tersebut hanya dua yang diberi bantuan, karena memang bantuan yang turun dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk alat pemecah kedelai hanya dua unit. Selain itu alat yang diberikan untuk Desa Urek-urek yaitu mesin jahit, obras, dan bordir.

4. Evaluasi Pelaksanaan Program

Setelah melalui beberapa tahapan dari pelaksanaan program tahap yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mesin pemecah kedelai di pedesaan. Untuk evaluasinya dengan melakukan kunjungan langsung oleh pegawai BPM dengan instansi terkait ke daerah yang mendapatkan bantuan program ini.

Dalam evaluasinya dilakukan kunjungan-kunjungan saja dan intensitasnya tidak teratur kadang 2 bulan sekali bahkan ada yang sampai setengah tahun sekali. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan evaluasi yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu penerima bantuan sekaligus ketua pokmas yaitu Buari sudah lama tidak dikunjungi oleh pegawai dari BPM.

Padahal kunjungan tersebut sangat penting untuk dilakukan, selain untuk mengevaluasi terhadap perkembangan kemajuan program apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yaitu dapat mensejahterakan masyarakat, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pokmas terutama kualitas dan kuantitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Tetapi juga menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sararan program maupun yang tidak atau belum mendapatkan bantuan.

Pada teorinya evaluasi ini dilaporkan secara tertulis oleh kelompok sasaran yang mendapatkan program. Namun dalam kenyataannya evaluasi ini tidak dilaporkan secara tertulis yang sistematis. Padahal jika dilaporkan secara tertulis maka akan lebih mudah dalam mengevaluasi terhadap jalannya program ini. Jika ada kesalahan atau kurang baik dalam pelaksanaan program maka lebih mudah untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di suatu saat nanti. Begitu juga jika ada perkembangan yang baik maka akan lebih bisa dijadikan perimbangan dalam membuat kebijakan yang akan datang.

4. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Terhadap Kelompok Sasaran

a. Produktivitas

Yang menjadi maksud dari produktivitas dalam penelitian ini yaitu seberapa banyak produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha dengan menghitung banyaknya jumlah bahan baku yang di pakai per hari dalam proses produksi. Tentu saja bahan baku utama dalam usaha tempe dan tahu yaitu kedelai. Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa produksi sebelum adanya program lebih sedikit, karena dalam satu kali produksi itu memakan waktu yang lama, sehingga jika ingin memproduksi lebih banyak tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama juga.

Dalam menghitung produktivitas dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas dilihat dari segi seberapa banyak bahan baku yang digunakan dalam kilogram (kg) dan produktivitas dilihat dari segi berapa nilai bahan baku dihitung dengan nilai uang (Rp). Untuk produksi dalam nilai uang akan digunakan untuk mengetahui pendapatan yang akan diperoleh, karena produksi dilihat dari segi nominal ini akan menunjukkan seberapa besar biaya produksi karena biaya produksi menyangkut pembelian bahan baku. Untuk pembelian bahan baku kedelai mengenai harganya menurut wawancara yang dilakukan harga bahan baku sering tidak stabil tetapi berkisar antara Rp 6000-an per kilogram.

Untuk Buari produksi sebelum adanya program rata-rata adalah 13 kg atau Rp 78.000,00. Sedangkan Muajir produksi rata-rata adalah 15 kg atau jika dirupiahkan Rp 90.000,00. Dan setelah adanya program terjadi peningkatan pemakaian bahan baku yaitu Buari rata-rata menjadi 20 kg atau Rp 120.000,00 dan Muajir rata-rata menjadi 25 kg atau Rp 150.000,00. jadi ada peningkatan produksi setelah adanya program bantuan peralatan ini, yaitu Buari rata-rata 53 % dan Muajir 66 %. Peningkatan produktivitas tidak hanya didasarkan pada peningkatan produksi tetapi juga ada efisiensi waktu. Dengan adanya peralatan pemecah kedelai ini dapat menghemat waktu. Menurut wawancara yang dilakukan dengan kedua penerima bantuan bahwa terjadi penghematan waktu yang cukup banyak. Biasanya dalam satu kali produksi 15 kg, harus dibagi menjadi 2 bagian untuk digilas dan tiap sekali gilasan memerlukan waktu 25

menit, jadi dalam 1 kali produksi diperlukan waktu 50 menit untuk menggilas kedelai. Sedangkan jika menggunakan perlatan ini dapat menghemat waktu 40 menit karena dengan alat ini dapat terselesaikan dalam sekali waktu 10 menit penggilasan. Tentunya dalam proses produksi dibutuhkan waktu yang lebih lama tentunya selain penggilasan ada proses lainnya lagi yang juga membutuhkan waktu. Untuk lebih jelasnya mengenai produktivitas bisa dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 11
Produksi (Kg) Sebelum dan Sesudah Program
di Desa Urek-urek

No.	Nama Kepala Keluarga	Produksi (Kg)		Peningkatan	
		Sebelum	Sesudah	(Kg)	(%)
1.	Buari	13	20	7	53
2.	Muajir	15	25	10	66
Jumlah		28	45	17	119
Rata-rata				8,5	59,5

Sumber : Data hasil wawancara dengan penerima bantuan yang diolah peneliti

Tabel 12
Produksi (Rp) Sebelum dan Sesudah Program
di Desa Urek-urek

No.	Nama Kepala Keluarga	Produksi (Rp)		Peningkatan	
		Sebelum	Sesudah	(Rp)	(%)
1.	Buari	78.000	120.000	42.000	53,8
2.	Muajir	90.000	150.000	60.000	66
Jumlah		168.000	270.000	102.000	119,8
Rata-rata				51.000	59,9

Sumber : Data hasil wawancara dengan penerima bantuan yang diolah peneliti

* Keterangan : Harga Kedelai Rp 6.000/kg

Tabel 13
Waktu Produksi Sebelum dan Sesudah Program
di Desa Urek-urek

No.	Nama Kepala Keluarga	Produksi dan Waktu Produksi				Penghematan Waktu	
		Sebelum		Sesudah		(menit)	(%)
		prod. (kg)	wkt (mnt)	prod. (kg)	wkt (mnt)		
1.	Buari	13	45	20	8	37	82
2.	Muajir	15	50	25	10	40	80
Jumlah		28	95	45	18	77	162
Rata-rata						38,5	81

Sumber : Data hasil wawancara dengan penerima bantuan yang diolah peneliti

b. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh bukan seluruh hasil penjualan tetapi harus dikurangi lebih dulu dengan biaya produksi atau bisa dinamakan dengan laba bersih. Biaya produksi diperoleh dari hasil penjumlahan pengeluaran antara lain untuk pembelian bahan baku kedelai, tenaga kerja (jika ada), kayu bakar, minyak goreng, ragi, tepung, plastik dan lilin. Jadi biaya produksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produksi. Biaya produksi sebelum adanya program untuk Buari sekitar Rp 90.000,00 dan Muajir sekitar Rp 110.000,00 tetapi setelah adanya program meningkat menjadi untuk buari sekitar Rp 140.000,00 dan Muajir Rp 180.000,00.

Laba bersih diperoleh dari selisih pendapatan/hasil penjualan dengan biaya produksi. Jadi laba bersih sebelum ada program untuk Buari adalah Rp 40.000,00 sedangkan untuk Muajir adalah Rp 40.000,00. dan setelah adanya program untuk buari menjadi Rp 60.000,00 dan Muajir Rp 70.000,00. setelah adanya program ini pendapatan menjadi meningkat rata-rata 62,5 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Pendapatan, Biaya Produksi, Laba Bersih
Sebelum dan Sesudah Program
di Desa Urek-urek

No	Nama KK	Pendapatan		Biaya Produksi		Laba Bersih		Peningkatan	
		sblm	ssdh	sblm	ssdh	sblm	ssdh	Rp	(%)
1.	Buari	130.000	200.000	90.000	140.000	40.000	60.000	20.000	50
2.	Muajir	150.000	250.000	110.000	180.000	40.000	70.000	30.000	75
Jumlah		280.000	450.000	200.000	320.000	80.000	130.000	50.000	125
rata-rata								25.000	62,5

Sumber : Data hasil wawancara dengan penerima bantuan yang diolah peneliti

* Keterangan : Harga Kedelai Rp 6.000/kg

c. Kesehatan

Di dalam membicarakan kesehatan pasti erat kaitannya dengan pembangunan. Setiap segi pembangunan saling mendukung satu sama lain. Juga kesehatan dan pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh. Kemajuan ekonomi mendorong perbaikan gizi yang memperkuat daya tahan tubuh. Kemajuan ekonomi juga mendorong perbaikan lingkungan hidup antara lain perumahan yang permanen dan sanitasi yang memadai sehingga mengurangi kejangkitan penyakit. Rendahnya kejangkitan penyakit dan tingginya daya tahan tubuh pada akhirnya meningkatkan taraf kesehatan. Sehingga taraf kesehatan dapat mendukung daya belajar dan daya kerja.

Desa Urek-urek hampir semuaarganya mempunyai rumah yang permanen. Dari data monografi desa yang ada 1201 buah rumah yang permanen, atau sekitar 73% dari seluruh jumlah KK yang ada, yaitu 1640 KK. Dan untuk sarana komunikasi dan informasi Desa urek-urek cukup lengkap. Untuk komunikasi ada 124 telepon pribadi dan 1374 KK pemilik pesawat TV. Sehingga berdasarkan sarana informasi yang ada Desa Urek-urek bisa dikatakan tidak tertinggal mengenai informasi tentang kesehatan.

Menurut wawancara dengan penerima bantuan maupun anggota yang lain bahwa sebagian uang yang mereka terima disisihkan untuk perbaikan rumah, dan membeli alat elektronik seperti televisi dan radio. Karena dengan sarana informasi seperti televisi dan radio akan menambah pengetahuan mereka tentang kesehatan. Dan menurut mereka, selama ini keluarga mereka tidak pernah terjangkit penyakit yang tergolong berat. Mungkin jika sakit hanya sakit biasa, biasa di obati dengan

obat toko sudah bisa sembuh. Namun jika memang tidak sembuh, mereka pergi ke Puskesmas terdekat. Karena mereka juga menyisihkan uang dari hasil berjualan tempe dan tahu untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit dan butuh biaya lebih untuk pengobatan.

Dengan adanya perumahan yang sebagian besar permanen, sanitasi yang memadai, pengetahuan tentang kesehatan yang memadai, serta pendapatan yang lebih baik maka bisa mendorong penerima bantuan untuk mencukupi gizi keluarga mereka dengan baik sehingga pada akhirnya bisa menambah taraf kesehatan.

d. Pendidikan dan Pengetahuan

Program ini tidak sekedar pemberian bantuan peralatan saja, tetapi juga ada pelatihan, penyuluhan dan pemberian buku-buku seri teknologi desa. Jadi selain menguasai alat yang diperbantukan tetapi juga mengetahui bagaimana tentang usaha yang lain, serta manajemen pengelolaannya. Selain itu sebelum adanya program ini mereka bisa dikatakan masyarakat ekonomi lemah, yang sebagian besar pendapatan mereka habis untuk pembelian kebutuhan dasar hidup. Tetapi setelah adanya program ini pendapatan mereka juga ikut terangkat sehingga bisa membeli kebutuhan sekunder lainnya. Misalkan pembelian alat-alat elektronik seperti televisi dan radio, sehingga bisa digunakan untuk menambah pengetahuan mereka. Jadi dengan adanya program ini dapat dikatakan pengetahuan mereka semakin bertambah.

Meskipun mayoritas penduduk Desa Urek-urek hanya tamat SD, tetapi setelah mendapatkan bantuan program ini mereka menjadi termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dulu orang tuanya hanya sekolah sampai SD saja, maka kini mereka ingin menyekolahkan minimal sampai SMA. Hal ini bisa dimaklumi karena mungkin dari segi biaya mereka telah cukup dan dengan adanya sarana informasi sehingga mereka menjadi sadar pentingnya pendidikan bagi kehidupan anak mereka.

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai

a. Faktor Pendorong

- 1) Keadaan alam dan lingkungan

Alam di Desa Urek-urek sangat Mendukung untuk kegiatan usaha di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Desa Urek-urek mempunyai lahan yang sangat subur, dan lahan yang tersedia untuk pertanian sangat luas. Selain itu Desa Urek-urek terletak pada tempat yang sangat strategis sehingga kondisi ini memungkinkan lingkungan serta masyarakat desa peka terhadap perkembangan.

Dengan lahan yang luas untuk pertanian maka tidak salah jika kedelai merupakan hasil panen yang menjadi andalan bagi masyarakat Desa urek-urek. Selain menjual kedelai-kedelai mereka, banyak masyarakat yang mengolah lebih lanjut kedelainya menjadi tahu dan tempe. Dengan adanya bantuan program peralatan mesin pemecah kedelai, maka mesin tersebut sangat bermanfaat bagi pengusaha tahu dan tempe. Program ini bisa berjalan karena lingkungan serta masyarakat Desa Urek-urek mendukung terhadap program ini.

2) Teknologi yang tepat dan berguna

Faktor lain yang dapat mendukung adalah teknologi yang diberikan sesuai dengan potensi yang ada di Desa Urek-urek dan para pengusaha dapat mengatasi masalah yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Desa Urek-urek banyak tersedia lahan-lahan yang luas untuk pertanian lahan paling banyak ditanami tebu dan kedelai. Selain itu di Desa Urek-urek ada sebagian masyarakat yang menjadi pengusaha tahu dan tempe. Maka jika sebagian penduduknya menerima bantuan peralatan mesin pemecah kedelai, program ini bisa dinilai tepat sasaran karena dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Untuk sebagian besar petani merasa senang karena kedelai mereka cepat terjual kepada para pengusaha tahu dan tempe tersebut.

Jadi yang tepat adalah adanya kesesuaian antara teknologi yang diperbantukan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima program, dan sesuai dengan lingkungan. Sedangkan berguna adalah peralatan yang diperbantukan melalui program tersebut dapat memberi manfaat kepada penerima bantuan sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

3) Aparat Pemerintah Yang Mendukung

Aparat pemerintah adalah adanya kepedulian dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara

memberdayakan masyarakat melalui peralatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai. Hal itu ditunjukkan dengan kerja keras dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap awal yaitu pemberitahuan tentang adanya program, pembentukan pokmas, sampai tahap akhir yaitu evaluasi.

b) Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program ini tentunya tidak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Di dalamnya terdapat faktor pendorong dan tentunya pula faktor yang menghambat proses pelaksanaan program tersebut.

1) Sosial Budaya

Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi tradisional secara turun-temurun dan sulit untuk diubah. Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan alat tradisional karena beberapa alasan bahwa usaha ini merupakan usaha turun-temurun dan selain itu jika menggunakan alat tradisional menurut mereka rasanya tempe lebih enak dari pada menggunakan alat modern.

Hal ini bisa terjadi karena masyarakat yang berpendapat seperti di atas, karena kurang mengenal baik dan yakin akan manfaat-manfaat teknologi yang dihasilkan oleh para peneliti dan pencipta. Dari cara penggunaan teknologi baru masyarakat masih terbelenggu dengan kebiasaan lama.

Di sisi lain, pekerjaan petani dan usaha industri rumah tangga kurang mendapat perhatian dari pemuda desa, dianggap sebagai pekerjaan yang status sosialnya rendah. Pemuda desa cenderung memilih pekerjaan di kota walaupun menjadi buruh pabrik. Tetapi menurut mereka lebih baik dari pada bekerja sebagai petani atau bekerja di industri rumah tangga. Hal ini dapat dimengerti karena lapangan pekerjaan tersebut tidak banyak membutuhkan kepandaian dan keterampilan yang tinggi. Modal utama mereka adalah tenaga dan kekuatan fisik yang besar.

2) Masalah Dana

Beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan dari Bidang Teknologi Tepat Guna pada kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang menyatakan bahwa masalah dana merupakan masalah klasik. Seperti kasus di Desa Urek-urek Pokmas mengajukan peralatan sebanyak 5 alat namun yang

disetujui oleh pemerintah kabupaten hanya 2 alat saja. Disatu pihak pemerintah berambisi mengadakan pengadaan peralatan lebih banyak tetapi di lain pihak faktor dana bagi upaya realisasi program itu sendiri menjadi masalah yang belum terpecahkan.

3) Interaksi Badan Pelaksana dan Masyarakat

Lembaga-lembaga formal yang menangani masalah pedesaan belum menunjukkan interaksi yang harmonis dengan masyarakat desa atau kelompok sasaran. Dengan interaksi yang kurang harmonis ini suatu program yang pada awalnya nampak mencapai keberhasilan, tetapi kelanjutannya menjadi menyusut bahkan sirna sama sekali. Hal yang demikian terjadi karena proyek pembangunan desa baru terlaksana dalam bentukan program yang belum dapat dihayati masyarakat desa sendiri. Sehingga program yang tadinya berjalan dengan baik karena adanya petugas yang memberikan bimbingan, lama kelamaan tersendat-sendat setelah bimbingan dan bantuan dikurangi atau mereka dilepas untuk bekerja sendiri.

Hal ini terlihat Pada Program ini pada mulanya berjalan dengan baik tetapi pada tahap setelah berjalan masyarakat dibiarkan berjalan sendiri. Kunjungan oleh aparat pemerintah jarang sekali diadakan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Pada kenyataannya selama ini masyarakat Desa Urek-urek yang mendapat bantuan hanya dikunjungi sekali oleh petugas.

B. Analisis dan Interpretasi

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan pada penyajian data bahwa program ini melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Yang pada intinya saling membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mesin Pemecah Kedelai agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mengingat program adalah sekumpulan kegiatan yang harus terkoordinasi dan konsisten dalam pelaksanaannya (Zauhar, 1997:10), maka keberhasilan program sangat tergantung pada kerja sama pihak-pihak yang terkait.

Disisi lain program ini yang paling dilibatkan yaitu masyarakat yang kurang berdaya, sehingga negara dipandang perlu untuk memberdayakan masyarakat tersebut. Namun jika keterlibatan negara terlalu dominan maka negara

akan memegang posisi sentral hal ini terlihat mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaan pembangunan. (Soetrisno,1995:135). Kenyataan ini banyak mendapatkan kritik karena dipandang tidak mempercayai kekuatan yang ada pada masyarakat khususnya dalam membangun dirinya sendiri. Akibat dari adanya konsep dan pendapat seperti ini, maka hal ini menjadi penghambat utama untuk timbulnya kearifan lokal sebagai unsur yang sangat menentukan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara menciptakan kemampuan dan potensi serta daya untuk mengembangkan dirinya ke arah lebih baik. Dengan demikian masyarakat selalu bersifat aktif untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan dirinya. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan keadaan sosial ekonominya.

Program pemberdayaan melalui teknologi tepat guna pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diharapkan tujuan dari program dapat terealisasikan dan memberi dampak yang baik pula.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program tidak akan berjalan dengan mulus, pasti mengalami kendala dan hambatan. Tetapi di sisi lain juga terdapat faktor pendorongnya yang dapat mensukseskan pelaksanaan program. Sehingga diperlukan langkah untuk mengeliminir hambatan dan perlu memikirkan langkah lagi untuk memudahkan pelaksanaan program.

Dari data-data yang ada pada penyajian data dianalisa untuk mengeliminir permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Agar nantinya dapat ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran yang dapat memperbaiki pelaksanaan program. Untuk itu pada pembahasan berikut ini adalah analisa data-data yang ada.

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Oleh BPM Kabupaten Malang

a) Persiapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan suatu program diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena tahap ini menentukan apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak, sehingga menjadi landasan dasar dari jalannya suatu program. Pada tahap ini diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan.

1) Inventarisasi dan Identifikasi

Inventarisasi dan identifikasi potensi desa dilakukan oleh masyarakat bersama dengan aparat desa dan LPMD dan BPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi desa yang dimiliki baik dari segi sumber daya alamnya, teknologi yang dimiliki dan kemungkinan bisa untuk lebih dikembangkan, manusianya, lingkungannya, kelembagaannya, serta kemungkinan permasalahan yang ada pada desa tersebut. Dari identifikasi ini bisa dilihat dengan spesifikasi teknologi jenis apa potensi desa tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut.

Dalam tabel 10 Desa Urek-urek mempunyai potensi hasil palawija yang perlu untuk dikembangkan. Dengan banyaknya potensi tersebut jika dikelola dengan baik maka dapat mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan begitu masyarakat masyarakat yang menjadi pengangguran dapat memperoleh lapangan kerja yang jelas sehingga memperbesar kesempatan untuk mencapai kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Dari daftar potensi tersebut baru kedelai saja yang dikelola dengan baik. Padahal jika dilihat sawah yang ditanami kedelai menempati tempat kedua dilihat dari luasnya lahan. Lahan yang terluas ditanami jagung, tanaman ini tentunya akan juga mempunyai prospek yang baik pula jika di kelola dengan baik. Baik itu dari segi cara penanamannya maupun dalam hal pengelolaan paska panen. Karena jika hasil panen jagung dijual hanya berupa jagung jika terjadi penumpukan pada pasar maka akan mempengaruhi harga jual jagung yang cenderung rendah. Hal ini tentunya akan berbeda jika jagung bisa diolah lebih lanjut, selain menjaga harga jagung tetap tinggi maka akan menambah nilai jual dari jagung tersebut. Seperti kedelai Masyarakat Desa Urek-urek mengolahnya lebih lanjut menjadi tempe dan tahu. Sehingga mendorong masyarakat untuk membuat industri rumah tangga

yang tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan dapat mengurangi jumlah penganggur didesa. Mungkin dalam hal ini jagung tidak dimasukkan ke dalam program karena masyarakat sekitar di Desa Urek-urek belum ada yang membuat industri rumah tangga pengelolaan jagung. Tetapi jika ada kelompok masyarakat pengusaha jagung bukan tidak mungkin akan mendapatkan bantuan peralatan juga.

Pada intinya inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan sudah cukup baik, karena tahap ini sudah melibatkan masyarakat maupun pemerintah desa beserta BPD. Sehingga dapat diketahui potensi Desa Urek-urek untuk lebih bisa dikembangkan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi, sehingga bisa dicari jalan untuk mengatasi masalah tersebut.

2) Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pengajuan Proposal

Kelompok Masyarakat ini dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk mengkoordinasikan diri dalam sebuah kegiatan usaha yang nantinya memperoleh manfaat yang berguna untuk pengembangan usahanya, tentunya melalui bantuan program ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengikis anggapan bahwa masyarakat bawah tidak dapat memperbaiki nasibnya sendiri. Dengan pembentukan Pokmas ini diharapkan masyarakat dapat merubah nasibnya sendiri tetapi mereka harus dituntun dan diberi petunjuk oleh pemerintah.

Melalui Pokmas ini pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan karena proses penyelenggaraan pembangunan bertumpu pada beberapa elemen masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dan pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada. Sehingga pokmas ini bisa diberdayakan melalui sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan yang berkelanjutan. (*people centered, development participatory, empowering and sustainable*) Chambers dalam Ginanjar (1996:142).

Menurut Kartasmita (1996:18) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah : 1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini bisa diartikan bahwa masyarakat yang tergabung dalam Pokmas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Melalui Pokmas ini bisa

diberdayakan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya. Tentunya potensi itu yaitu usaha rumah tangga produksi tahu dan tempe. 2) arah yang kedua yaitu dengan memperkuat potensi yang dimiliki. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan akses kepada berbagai peluang yang mengaktualisasikan masyarakat. Di dalam pembentukan Pokmas ini tentunya memiliki potensi yang bisa dikembangkan yaitu usaha mereka di bidang pembuatan tahu dan tempe. Meskipun usaha ini masih tergolong usaha rumah tangga tetapi jika dengan melihat potensi yang dimiliki maka akan mudah untuk dikembangkan menjadi industri yang lebih besar lagi. 3) Selanjutnya yaitu melindungi jika dalam prosesnya terdapat pihak yang lemah akan menjadi semakin lemah, karena ketidakberdayaannya. Di dalam anggota Pokmas ini pasti jumlah modal dan omset usaha masing-masing anggota tidak sama, jadi di dalam perkembangannya mungkin ada anggota beberapa yang mampu bertahan dan mungkin akan gulung tikar. Untuk itu berdasarkan teori pemberdayaan anggota yang lemah ini harus dilindungi agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya. Tentunya anggota kelompok ini harus saling membantu satu sama lain.

Setelah terbentuk Pokmas, maka pokmas harus mengajukan proposal kepada kantor BPM. Pembuatan proposal ini harus baik, dan pembuatannya berdasarkan pemikiran dari semua elemen yang terlebar di dalam program ini yaitu aparat desa, masyarakat kelompok sasaran, dan perwakilan dari BPD. Dari proposal ini maka akan terlihat potensi desa serta permasalahan yang ada di Desa Urek-urek. Dan sebagai pertimbangan BPM untuk melakukan survei apakah Desa Urek-urek layak mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi ketepatan kelompok sasaran dan isi proposal inilah yang menentukan apakah layak diberi bantuan atau tidak. Setelah ditunggu selama enam bulan baru mendapatkan balasan dari kantor BPM yang menyatakan bahwa Desa Urek-urek mendapatkan bantuan Program Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai.

b) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan sebuah proses untuk mengoperasikan program-program yang disusun menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor BPM Kabupaten Malang proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan, dan evaluasi program.

1) Pelatihan dan penyuluhan

Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan ini merupakan langkah yang pertama sebelum program benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena di dalam pelatihan dan penyuluhan memperkuat dan mengembangkan kemampuan teknologi masyarakat dengan bertolak dari lingkungan sosial, ekonomi, geografis, dan budaya mereka sendiri (Juoro 1985 : 161). Oleh karena itu keberhasilan dari program ini lebih ditentukan dari kualitas sumber daya manusianya.

Pelatihan dan penyuluhan dilakukan untuk menambah pengetahuan kelompok sasaran di mana kemampuan dalam mengasimilasi dan reproduksi, motivasi sosial, kebanggaan terhadap kebudayaan asli, dan kreativitas masyarakat merupakan landasan dasar bagi perkembangan keberhasilan program ini. Berkembangnya kemampuan teknologi tidak memandang apakah desa yang bersangkutan kaya akan sumber daya alam atau memiliki modal yang besar, tetapi bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada pada desa tersebut. Dengan kekayaan alam yang minim begitu juga modal, suatu desa dapat dapat mengembangkan kemampuan teknologinya dengan mengandalkan dan bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya.

Tujuan dari pelatihan dan penyuluhan yaitu membantu suatu masyarakat statis agar berubah menjadi masyarakat dinamik yang menghasilkan budi daya komersil, sambil meningkatkan mutu dan taraf kehidupan keluarga dan masyarakat. Penyuluhan biasanya mengkhususkan pelimpahan informasi tentang cara kerja teknis yang mutakhir, sedangkan pelatihan lebih menitikberatkan pengajaran yang sistematis serta mendalam untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dasar tertentu. Suatu program pelatihan dan penyuluhan biasanya menghimpunkan para peserta pada suatu pusat diklat/ diasramakan untuk waktu tertentu, yang diatur sebagai suatu rangkaian satuan pendidikan yang menggabungkan pengajaran teori dan latihan praktek.

Seperti yang sudah pernah dilakukan yaitu pelatihan TTG ini pada tanggal 19 s/d 21 Desember 2005 di Wisma Bhaswara Dokdikjur Malang, pelatihan ini dapat berjalan lancar karena instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini benar-benar berkompeten. Dan instansi di dalamnya sangat tepat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selain itu dalam pelatihan ini diajarkan pengenalan tentang dasar-dasar manajemen pengelolaan usaha, pengendalian mutu, dan lebih teknis mengenai cara kerja alat untuk memproduksi serta perawatannya.

Maka dengan pelatihan tersebut peserta dapat menyerap informasi dan pengetahuan serta menyampaikan informasi tersebut selama pelatihan kepada masyarakat lainnya. Penyampaian informasi dan pengetahuan baru ini dapat sedikit membuka pemikiran masyarakat desa untuk mengenal teknologi baru. Tentunya pelatihan ini akan sangat mendukung jalannya program dan tujuan dari program ini dapat tercapai.

2) Pengembangan dan Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna

Di dalam pengembangan dan penyebarluasan teknologi tepat guna yaitu dengan mengikuti Gelar TTG Nasional dengan tujuan tukar informasi antar daerah lain yang juga mengikuti gelar TTG nasional jika ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknologi yang mereka pameran. Dengan begitu bisa melengkapi satu sama lain dan membawa pemikiran yang lebih maju sehingga bisa membuat teknologi yang lebih baik dan tercipta inovasi di bidang teknologi.

Maka dengan adanya pengembangan teknologi tersebut dapat membuka kesadaran masyarakat mengenai pentingnya teknologi dalam kehidupan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi pedesaan. Melalui Gelar TTG ini masyarakat lebih mengenal teknologi untuk kemajuan industri rumah tangga yang dapat meningkatkan nilai produktivitas dan menambah efektivitas usaha. Selain itu melalui Gelar TTG Nasional ini yang tentunya akan dihadiri oleh tokoh penting nasional seperti Meneg Ristek, daerah bisa engutarakan permasalahan yang mereka hadapi. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi

Tepat Guna disebutkan secara transparan bahwa peran Meneg Ristek/ Ka. BPPT adalah mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, uji coba dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara makro/ nasional. Salah satu strategi yang digunakan untuk memberikan sinergi bagi penajajaran kegiatan R&D BPPT ini adalah melakukan identifikasi permasalahan teknologi yang dihadapi oleh daerah. Informasi permasalahan teknologi di daerah ini akan mempertajam luaran produk dan jasa BPPT dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna untuk menjawab permasalahan masyarakat. Diseminasi teknologi tepat guna yang dihasilkan BPPT diharapkan akan menghasilkan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri bagi peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Disamping itu dalam melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan teknologi tepat guna masyarakat di Kabupaten Malang, diarahkan untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, mengubah kebijakan yang selama ini menempatkan desa sebagai garis belakang dalam proses pembangunan menjadi garis depan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat masyarakat Kabupaten Malang masih banyak yang dipengaruhi adat dan kebiasaan yang cukup mengikat dengan pola anutan bagi tokoh-tokoh tertentu.

3) Evaluasi Pelaksanaan Program

Dalam proses pelaksanaan program ini tahap evaluasinya berjalan kurang baik. Hal ini dikarenakan tahap evaluasi yaitu kunjungan dari BPM dan instansi terkait tidak berjalan dengan semestinya. Intensitas dari kunjungan tersebut tidak teratur, dan berkala. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan evaluasi yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik.

Padahal kunjungan tersebut sangat penting untuk dilakukan, selain untuk mengevaluasi terhadap perkembangan kemajuan program apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yaitu dapat mensejahterakan masyarakat, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pokmas terutama kualitas dan kuantitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Tetapi juga menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran program maupun yang tidak atau belum mendapatkan bantuan.

Pada teorinya evaluasi ini dilaporkan secara tertulis oleh kelompok sasaran yang mendapatkan program. Namun dalam kenyataannya evaluasi ini tidak dilaporkan secara tertulis yang sistematis. Padahal jika dilaporkan secara tertulis maka akan lebih mudah dalam mengevaluasi terhadap jalannya program ini. Jika ada kesalahan atau kurang baik dalam pelaksanaan program maka lebih mudah untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di suatu saat nanti. Begitu juga jika ada perkembangan yang baik maka akan lebih bisa dijadikan perimbangan dalam membuat kebijakan yang akan datang.

2. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai Terhadap Kelompok Sasaran

a) Produktivitas

Teknologi merupakan variabel penting di dalam strategi pembangunan. Hampir setiap permasalahan dalam pembangunan ekonomi mengarah pada masalah teknologi. Seperti yang dikemukakan Habibie dalam Juoro (1998: 65)

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sinambung dalam jangka panjang tidak dapat hanya mengandalkan investasi modal dan ketersediaan tenaga kerja saja, tetapi membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan lain yang intinya bersumber pada kemampuan teknologi dan SDM. Sumber-sumber ini sangat menentukan kemampuan tenaga kerja kita untuk lebih produktif.”

Jadi jelas sekali produktivitas dari usaha sangat dipengaruhi teknologi yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Dan juga tidak kalah penting setelah teknologi yaitu SDM yang baik. Jika tidak didukung SDM yang baik meskipun teknologi yang digunakan sudah cukup baik maka teknologi tersebut akan sia-sia. Karena manusianya tidak dapat menjalankan teknologi tersebut dengan baik. Untuk itulah program ini dilengkapi pula pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum program tersebut dilaksanakan. Sehingga SDM dari kelompok sasaran akan lebih baik pula.

Dari data yang ada produktivitas setelah adanya program ini meningkat sangat baik, yaitu terjadi peningkatan rata-rata dari kedua usaha rumah tangga yang mendapatkan bantuan yaitu 8,5 kg atau Rp 51.000,00 (catatan: harga kedelai Rp 6.000/kg). Sebelum adanya program total untuk kedua usaha rumah tangga ini yaitu 28 kg/hari namun setelah adanya program meningkat menjadi 45 kg/hari.

Jika peningkatan kedua usaha rumah tangga ini ditotal peningkatan produksi sebesar 17 kg/hari atau meningkat 119 % dari keadaan sebelum program. Juga terjadi penghematan waktu dalam proses produksi, rata-rata proses produksi menjadi 38,5 menit.

b) Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, dan program pemerintah lain pada intinya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Juoro(1985:136). Penilaian sejahtera sendiri sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara obyektif. Namun, setidaknya indikator yang dipakai di dunia internasional dapat digunakan sebagai tolak ukur, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengetahuan, dan juga pendapatan.

Dari pendapat Juoro di atas, teknologi bukan satu-satunya instrumen yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Instrumen lainnya yaitu program pemerintah dan adanya pertumbuhan ekonomi. Dari ketiga instrumen ini saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Program pemerintah dibuat untuk memberdayakan masyarakat disertai teknologi yang tepat guna menunjang program tersebut, yang nantinya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian. Dengan disertakannya teknologi yang tepat guna karena hal ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat kebanyakan di Indonesia, yang memang belum muumpuni, baik dari segi modal maupun sumber daya manusia jika menggunakan teknologi yang canggih dan modern.

Melalui teknologi tepat guna ini lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia, produktivitas pun bisa jauh lebih meningkat dari pada alat tradisional yang mereka pakai selama ini. Dengan adanya peningkatan produktivitas tentunya akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan atau laba bersih dalam hal ini diperoleh dari selisih hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi.

Peningkatan pendapatan ini dapat dilihat pada tabel 14, bahwa jumlah laba bersih kedua penerima bantuan sebelum adanya program yaitu sebesar Rp 80.000,00 tetapi setelah adanya program meningkat menjadi Rp 130.000,00. Rata-rata meningkat peningkatannya Rp 25.000,00 atau jika dipersenkan rata-rata

sebesar 62,5%. Pendapatan ini meningkat karena adanya peningkatan produktivitas usaha sedangkan kekuatan pasar tetap sama.

c) Kesehatan

Di dalam membicarakan kesehatan pasti erat kaitannya dengan pembangunan. Setiap segi pembangunan saling mendukung satu sama lain. Juga kesehatan dan pembangunan masyarakat desa secara menyeluruh. Kemajuan ekonomi mendorong perbaikan gizi yang memperkuat daya tahan tubuh. Kemajuan ekonomi juga mendorong perbaikan lingkungan hidup antara lain perumahan yang permanen dan sanitasi yang memadai sehingga mengurangikejangkitan penyakit. Rendahnya kejangkitan penyakit dan tingginya daya tahan tubuh pada akhirnya meningkatkan taraf kesehatan. Sehingga taraf kesehatan dapat mendukung daya belajar dan daya kerja (Hagul, 1985:103).

Masalah kesehatan yang paling menonjol di daerah pedesaan adalah tingginya angka kejadian penyakit menular, kurangnya pengertian masyarakat tentang syarat hidup sehat, gizi yang jelek, dan keadaan *hygiene* dan sanitasi yang jauh dari memuaskan. Kejadian penyakit menular ini sebenarnya banyak bisa dikurangi kalau memiliki pengertian yang baik mengenai syarat hidup sehat dan dengan di perbaikinya keadaan *hygiene* dan sanitasi. Keadaan gizi yang jelek membuat keadaan lebih buruk karena menyebabkan daya tahan tubuh kurang, mudah terserang penyakit, dan berakibat pula pada tingginya angka kematian dari penderita penyakit menular tersebut.

Desa Urek-urek hampir semua warganya mempunyai rumah yang permanen. Dari data monografi desa yang ada 1201 buah rumah yang permanen, atau sekitar 73% dari seluruh jumlah KK yang ada, yaitu 1640 KK. Dan untuk sarana komunikasi dan informasi Desa urek-urek cukup lengkap. Untuk komunikasi ada 124 telepon pribadi dan 1374 KK pemilik pesawat TV. Sehingga berdasarkan sarana informasi yang ada Desa Urek-urek bisa dikatakan tidak tertinggal mengenai informasi tentang kesehatan.

Menurut wawancara dengan penerima bantuan maupun anggota yang lain bahwa sebagian uang yang mereka terima disisihkan untuk perbaikan rumah, dan membeli alat elektronik seperti televisi dan radio. Karena dengan sarana informasi seperti televisi dan radio akan menambah pengetahuan mereka tentang kesehatan.

Dan menurut mereka, selama ini keluarga mereka tidak pernah terjangkau penyakit yang tergolong berat. Mungkin jika sakit hanya sakit biasa, biasa di obati dengan obat toko sudah bisa sembuh. Namun jika memang tidak sembuh, mereka pergi ke Puskesmas terdekat. Karena mereka juga menyisihkan uang dari hasil berjualan tempe dan tahu untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit dan butuh biaya lebih untuk pengobatan.

Selain itu fasilitas kesehatan yang kurang atau akses yang sulit di daerah pedesaan menyebabkan sebagian besar masyarakat masih sulit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengobatan. Dan walaupun fasilitas layanan itu tersedia sering tidak tersedia sarana yang cukup. Hal lain yang mempersulit usaha pertolongan pengobatan adalah kenyataan yang sering dimana penderita atau keluarga penderita tidak dengan segera berusaha mencari pertolongan pengobatan, diusahakan cara-cara lain untuk menyembuhkan dengan berusaha mengusir “benda asing” atau “*spirit*” yang masuk ke dalam badan si sakit.

Keadaan semacam merupakan keadaan yang umum dijumpai di pedesaan. Di mana tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan merupakan keadaan yang menonjol. Dalam lingkup permasalahan seperti di atas. Jelas bahwa usaha untuk mengatasinya tidak sekedar usaha kedokteran yang menyangkut hal-hal seperti obat, dokter, perawat, rumah sakit, dan lain sebagainya. Melainkan harus meliputi aspek yang lebih luas.

d) Pendidikan dan pengetahuan

Mayoritas penduduk berdasarkan data monografi desa yaitu lulusan SD, namun ini banyak di dominasi oleh generasi tua dari masyarakat desa tersebut. Untuk generasi mudanya sudah banyak yang lulusan SMP, SMA, maupun yang lulusan dari perguruan tinggi. Yang menjadi kendala yaitu penduduk mayoritas SD inilah karena mungkin kesadaran terhadap pendidikan sangat kurang, kenyataan ini akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Jika tidak diberikan wawasan mengenai pentingnya pendidikan maka akan banyak generasi muda desa tersebut yang berpendidikan rendah. Yang menyebabkan desa tersebut sulit untuk maju ke arah yang lebih baik. Namun tentu saja kemajuan desa tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan saja. Seperti yang dikemukakan oleh Combs dan Ahmed (1985:19)

“ Pembangunan pedesaan merupakan hasil dari berbagai kekuatan yang berinteraksi. Salah satu kekuatan itu pasti pendidikan dalam aneka bentuk dan menyangkut sejumlah besar penduduk, namun jika tidak ada kekuatan pelengkap lainnya, pendidikan itu tidak akan mampu membangkitkan proses dinamik untuk pembangunan pedesaan”.

Tetapi melalui program ini sudah terjadi perubahan meskipun sedikit. Ini terbukti sudah tumbuh motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, paling tidak lebih baik dari orang tuanya. Seperti yang dikemukakan oleh Buari “Kedua anak saya lulusan SMA, anak yang pertama laki-laki sekarang bekerja di Arab Saudi, yang kedua perempuan sedang bekerja di kalimantan”. Ini dikarenakan, setelah adanya bantuan peralatan pendapatan mereka meningkat. Sehingga mampu menyekolahkan anak mereka lebih baik dari pendidikan mereka sebelumnya.

Menurut Combs dan Ahmed (1985 : 21) untuk keperluan praktis seluruh kebutuhan di pedesaan itu dapat dibagi menjadi empat kelompok :

5. *pendidikan umum dan dasar* : melek-aksara, melek angka, pengertian dasar ilmu pengetahuan dan lingkungan yang pada umumnya diusahakan oleh sekolah dasar dan lanjutan umum.
6. *pendidikan kesejahteraan keluarga* : terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan watak yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencakup mata pelajaran seperti ilmu kesehatan, ilmu gizi, kepandaian rumah tangga dan pengasuhan kanak-kanak, pemeliharaan dan penyempurnaan perumahan, keluarga berencana, dan sebagainya.
7. *pendidikan kemasyarakatan* : yang bertujuan mengokohkan serta menyempurnakan lembaga-lembaga dan proses-proses daerah dan nasional melalui pengajaran tentang soal-soal pemerintah daerah dan negara, gerakan koperasi, proyek pembangunan masyarakat, dan sebagainya.
8. *pendidikan kejuruan* : dirancang untuk membina kepandaian atau keterampilan tertentu yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi, dan yang berfaedah untuk mencari nafkah.

Mayoritas penduduk desa Urek-urek menyekolahkan anak mereka ke pendidikan formal. Alangkah lebih baik jika mereka menyekolahkan pendidikan mereka ke sekolah kejuruan. Yaitu program pendidikan yang diarahkan kepada pembinaan keterampilan yang dapat dipasarkan dan yang akan memperlancar pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di desa tersebut.

Selain itu setelah kelompok pengusaha tahu dan tempe mendapatkan bantuan maka timbul keinginan dari sebagian masyarakat lain yang mempunyai jenis usaha lain ingin membentuk pokmas. Mereka ingin mengajukan proposal ke BPM supaya dipertimbangkan dan diberi bantuan program untuk peralatan yang sesuai dengan jenis usaha mereka, misal mesin perontok padi, mesin perontok jagung, namun sampai sekarang proposal yang dikirim belum mendapat jawaban dari BPM.

Dari kenyataan ini setelah adanya program ini masyarakat Desa Urek-urek jadi mempunyai wawasan yang luas. Karena selain pokmas mengikuti pelatihan dan penyuluhan, mereka yang mengikuti pelatihan menularkan ilmu mereka kepada masyarakat sekitarnya. Yaitu dengan cara untuk menjadi pembicara pada saat ada rapat di desa tersebut.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai

a) Faktor Pendorong

1) Keadaan alam dan lingkungan

Dalam suksesnya suatu program perlu didukung oleh beberapa potensi yang ada di mana program itu diterapkan. Salah satunya yaitu kondisi alam dan lingkungan yang sesuai. Di dalam program ini alam Desa urek-urek sudah sangat mendukung yaitu dengan tersedianya lahan yang baik untuk pertanian. Tetapi lahan saja tentu tidak cukup jika tidak di sertai dengan cara pengolahan lahan yang baik dan perawatan terhadap tanaman pertanian.

Sedangkan masyarakat Desa Urek-urek sangat antusias terhadap program ini sejak program ini dikenal oleh masyarakat. Dengan adanya dukungan dari masyarakat maka program ini di Desa Urek-urek bisa berjalan dengan baik sehingga tercapai tujuan yang diharapkan dan bisa membuka wawasan bagi masyarakat yang lain untuk mencoba mengikuti program pada bidang yang lain.

2) Teknologi yang tepat dan berguna

Faktor lain yang dapat mendukung adalah teknologi yang diberikan sesuai dengan potensi yang ada di Desa Urek-urek dan para pengusaha dapat mengatasi masalah yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Desa Urek-urek

banyak tersedia lahan-lahan yang luas untuk pertanian lahan paling banyak ditanami tebu dan kedelai. Selain itu di Desa Urek-urek ada sebagian masyarakat yang menjadi pengusaha tahu dan tempe.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan pemerintah daerah mengenai perkembangan teknologi karena adanya pengaruh pengembangan teknologi dari luar, membawa kepada pemikiran-pemikiran dibutuhkannya teknologi yang bersifat tepat guna dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih padat karya, lebih mungkin untuk dikuasai dan diperbaiki, lebih sesuai dengan kemampuan pengelolaannya, dan lebih harmonis baik ekologi jika diterapkan pada masyarakat desa. Maka jika sebagian penduduk Desa Urek-urek menerima bantuan peralatan mesin pemecah kedelai, program ini bisa dinilai tepat sasaran karena dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

3) Aparat Pemerintah Yang Mendukung

Untuk mengatasi atau mengeliminir masalah kemiskinan yang ada di pedesaan, maka menurut Juoro (1985 : 6) ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) adanya sumber-sumber untuk menghapuskan kemiskinan; (2) adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan.

Sumber-sumber untuk menghapuskan kemiskinan itu sebetulnya sudah tersedia di pedesaan antara lain sumber daya yang berupa jumlah penduduk dan kekayaan alam yang melimpah di desa pada dasarnya merupakan modal yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan aset kekayaan yang berupa modal lancar yang terdapat di kota.

Seperti pendapat Juoro di atas terlihat bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kepedulian dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui peralatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai. Hal itu ditunjukkan dengan kerja keras dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap awal yaitu pemberitahuan tentang adanya program, pembentukan pokmas, sampai tahap akhir yaitu evaluasi.

b) Faktor Penghambat

1) Sosial Budaya

Dalam pikiran sebagian masyarakat Desa Urek-urek terdapat pandangan yang sempit di kalangan masyarakat, dalam masyarakat terdapat pandangan yang terbatas tentang dunia luar. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan mereka untuk mengadsorpsi atau menyerap sesuatu yang datang dari luar komunitas mereka. Seperti penyerapan berita yang ada di media massa. Sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Disamping itu ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide sehingga aspirasi atau keinginan yang ada sangat rendah dan terbatas untuk menggapai masa depan.

Dari keadaan sosial mereka maka tidak ada upaya untuk meningkatkan hasil dari pertanian dan usaha industri rumah tangga mereka. Kebanyakan cara kerja mereka hanya mengandalkan pada teknik tradisional saja. Ini dapat diatasi melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat secara langsung, yaitu dengan mengenalkan suatu program sekaligus mengajak masyarakat untuk mengerti tentang tujuan-tujuan program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

2) Masalah Dana

Beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan dari Bidang Teknologi Tepat Guna pada kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang menyatakan bahwa masalah dana merupakan masalah klasik. Seperti kasus di Desa Urek-urek Pokmas mengajukan peralatan sebanyak 5 alat namun yang disetujui oleh pemerintah kabupaten hanya 2 alat saja. Dengan turunnya jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan anggapan masyarakat maka dalam pikiran masyarakat timbul bahwa program ini kurang berperan bagi masyarakat dan menyalahkan BPM, karena menguntungkan sebagian kecil masyarakat saja.

Karena kurang mengertinya masyarakat terhadap fungsi BPM, mungkin mereka menganggap sebagai badan tempat bergantung dalam memenuhi segala kebutuhan dan mungkin juga hanya sebagai badan yang memberi janji-janji muluk tanpa ada realisasinya. Maka anggapan yang salah ini akan membawa masalah besar dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Masalah ini bisa diatasi dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat desa

tanpa menonjolkan secara berlebihan bentuk formal BPM dan secara bertahap memberikan pengertian apa sebenarnya BPM.

3) Interaksi Badan Pelaksana dan Masyarakat

Lembaga-lembaga formal yang menangani masalah pedesaan belum menunjukkan interaksi yang harmonis dengan masyarakat desa atau kelompok sasaran. Dengan interaksi yang kurang harmonis ini suatu program yang pada awalnya nampak mencapai keberhasilan, tetapi kelanjutannya menjadi menyusut bahkan sirna sama sekali. Hal yang demikian terjadi karena proyek pembangunan desa baru terlaksana dalam bentukan program yang belum dapat dihayati masyarakat desa sendiri. Sehingga program yang tadinya berjalan dengan baik karena adanya petugas yang memberikan bimbingan, lama kelamaan tersendat-sendat setelah bimbingan dan bantuan dikurangi atau mereka dilepas untuk bekerja sendiri.

Hal ini terlihat pada program ini pada mulanya berjalan dengan baik tetapi pada tahap setelah berjalan masyarakat dibiarkan berjalan sendiri. Kunjungan oleh aparat pemerintah jarang sekali diadakan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Pada kenyataannya selama ini masyarakat Desa Urek-urek yang mendapat bantuan hanya dikunjungi sekali oleh petugas.

Untuk mengatasinya petugas lapangan yang berinteraksi dengan masyarakat harus dibekali dengan penguasaan program yang baik dan pengetahuan akan kultur dan kondisi lainnya pada masyarakat desa. Sehingga bimbingan yang diberikan memberi penguatan motivasi masyarakat desa akan arti pembangunan. Dengan interaksi yang demikian maka masyarakat desa dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tidak beranggapan bekerja untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai di Desa Urek-urek sesuai dengan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam pelaksanaan program ini. Namun sejauh ini program ini masih memberikan manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat. Hal itu bisa dilihat dengan meningkatnya pendapatan kelompok sasaran, dan perubahan pola pikir masyarakat di Desa urek-urek dari pemikiran yang kolot atau ketinggalan zaman kearah yang lebih maju. Hal ini terbukti dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan, kesehatan, maupun perbaikan lingkungan yang mendorong terciptanya kesejahteraan hidup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai di Desa Urek-urek dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pelaksanaan suatu program diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena tahap ini menentukan apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak, sehingga menjadi landasan dasar dari jalannya suatu program. Pada tahap ini telah tercipta kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan.

Pada tahap persiapan ini dilakukan inventarisasi dan identifikasi potensi desa dilakukan oleh masyarakat bersama dengan aparat desa dan LPMD dan BPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi desa yang dimiliki baik dari segi sumber daya alamnya, teknologi yang dimiliki dan kemungkinan bisa untuk lebih dikembangkan, manusianya, lingkungannya, kelembagaannya, serta kemungkinan permasalahan yang ada pada desa tersebut. Dari identifikasi ini bisa dilihat

dengan spesifikasi teknologi jenis apa potensi desa tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut.

Proses selanjutnya yaitu pembentukan kelompok masyarakat, pokmas ini dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk mengkoordinasikan diri dalam sebuah kegiatan usaha yang nantinya memperoleh manfaat yang berguna untuk pengembangan usahanya, tentunya melalui bantuan program ini.

Setelah terbentuk Pokmas, maka pokmas harus mengajukan proposal kepada kantor BPM. Pembuatan proposal ini harus baik, dan pembuatannya berdasarkan pemikiran dari semua elemen yang terlebar di dalam program ini yaitu aparat desa, masyarakat kelompok sasaran, dan perwakilan dari BPD. Dari proposal ini maka akan terlihat potensi desa serta permasalahan yang ada di Desa Urek-urek. Dan sebagai pertimbangan BPM untuk melakukan survei apakah Desa Urek-urek layak mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi ketepatan kelompok sasaran dan isi proposal inilah yang menentukan apakah layak diberi bantuan atau tidak.

2. Pelaksanaan program merupakan sebuah proses untuk mengoperasikan program-program yang disusun menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor BPM Kabupaten Malang proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan, dan evaluasi program.

Pelatihan dan penyuluhan dilakukan untuk menambah pengetahuan kelompok sasaran. Pelatihan ini dapat berjalan lancar karena instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini benar-benar berkompeten. Dan instansi di dalamnya sangat tepat yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selain itu dalam pelatihan ini diajarkan pengenalan tentang dasar-dasar manajemen pengelolaan usaha, pengendalian mutu, dan lebih teknis mengenai cara kerja alat untuk memproduksi serta perawatannya.

Di dalam pengembangan dan penyebarluasan teknologi tepat guna yaitu dengan mengikuti Gelar TTG Nasional dengan tujuan tukar informasi antar daerah lain yang juga mengikuti gelar TTG nasional jika ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknologi yang mereka pameran. Dengan begitu bisa melengkapi satu sama lain dan membawa pemikiran yang lebih maju sehingga bisa membuat teknologi yang lebih baik dan tercipta inovasi di bidang teknologi.

Dalam proses pelaksanaan program ini tahap evaluasinya berjalan kurang baik. Hal ini dikarenakan tahap evaluasi yaitu kunjungan dari BPM dan instansi terkait tidak berjalan dengan semestinya. Intensitas dari kunjungan tersebut tidak teratur, dan berkala. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan evaluasi yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik.

Padahal kunjungan tersebut sangat penting untuk dilakukan, selain untuk mengevaluasi terhadap perkembangan kemajuan program apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah yaitu dapat mensejahterakan masyarakat, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pokmas terutama kualitas dan kuantitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Tetapi juga menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran program maupun yang tidak atau belum mendapatkan bantuan.

3. Dari data yang ada produktivitas setelah adanya program ini meningkat sangat baik, yaitu terjadi peningkatan rata-rata dari kedua usaha rumah tangga yang mendapatkan bantuan yaitu 8,5 kg atau Rp 51.000,00 (catatan: harga kedelai Rp 6.000/kg). Juga terjadi penghematan waktu dalam proses produksi, rata-rata proses produksi menjadi 38,5 menit.
4. Dari sisi pendapatan terlihat bahwa jumlah laba bersih kedua penerima bantuan sebelum adanya program yaitu sebesar Rp 80.000,00 tetapi setelah adanya program meningkat menjadi Rp 130.000,00. Rata-rata meningkat peningkatannya Rp 25.000,00 atau jika dipersenkan rata-rata sebesar 62,5%.
5. Kesehatan masyarakat di Desa Urek-urek sebenarnya sudah cukup baik hal ini dikarenakan rumah mereka banyak yang sudah permanen dan sanitasi

juga baik. Juga pengetahuan tentang kesehatan sangat baik, hal ini ditunjang sarana informasi seperti televisi dan radio yang akan menambah pengetahuan mereka tentang kesehatan. Untuk kesehatan keluarga kelompok sasaran sudah sangat baik, hal ini terjadi karena gizi mereka tercukupi karena seiring dengan meningkatnya pendapatan mereka. Tercukupinya gizi dapat memperbaiki daya tahan tubuh mereka sehingga tidak mudah terserang penyakit dan berakibat semakin rendahnya angka kematian dan penderita penyakit menular.

6. Mayoritas penduduk berdasarkan data monografi desa yaitu lulusan SD, namun ini banyak di dominasi oleh generasi tua dari masyarakat desa tersebut. Untuk generasi mudanya sudah banyak yang lulusan SMP, SMA, maupun yang lulusan dari perguruan tinggi. Yang menjadi kendala yaitu penduduk mayoritas SD inilah karena mungkin kesadaran terhadap pendidikan sangat kurang, kenyataan ini akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Tetapi melalui program ini sudah terjadi perubahan meskipun sedikit. Ini terbukti sudah tumbuh motivasi mereka untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, paling tidak lebih baik dari orang tuanya. Ini dikarenakan, setelah adanya bantuan peralatan pendapatan mereka meningkat. Sehingga mampu menyekolahkan anak mereka lebih baik dari pendidikan mereka sebelumnya.
7. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai didukung oleh keadaan alam dan lingkungan yang sesuai. Keadaan alam ini yaitu lahan pertanian yang luas serta lingkungan masyarakat yang mendukung program ini. Faktor lain yang dapat mendukung adalah teknologi yang diberikan sesuai dengan potensi yang ada di Desa Urek-urek. Selain itu dukungan Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kepedulian dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui peralatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai. Hal itu ditunjukkan dengan kerja keras dalam proses pelaksanaan mulai dari tahap awal yaitu pemberitahuan tentang adanya program, pembentukan pokmas, sampai tahap akhir yaitu evaluasi.

Namun dalam pelaksanaannya ada juga faktor yang menghambat kelancaran program. Seperti sosial budaya masyarakat desa, dimana cenderung terdapat pikiran yang sempit ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide sehingga aspirasi atau keinginan yang ada sangat rendah dan terbatas untuk menggapai masa depan. Kebanyakan cara kerja mereka hanya mengandalkan pada teknik tradisional saja.

Masalah dana merupakan masalah klasik. Seperti kasus di Desa Urek-urek Pokmas mengajukan peralatan sebanyak 5 alat namun yang disetujui oleh pemerintah kabupaten hanya 2 alat saja. Dengan turunnya jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan anggapan masyarakat maka dalam pikiran masyarakat timbul bahwa program ini kurang berperan bagi masyarakat dan menyalahkan BPM, karena menguntungkan sebagian kecil masyarakat saja.

Faktor penghambat lainnya yaitu interaksi yang kurang harmonis antar petugas lapangan dengan masyarakat. Suatu program yang pada awalnya nampak mencapai keberhasilan, tetapi kelanjutannya menjadi menyusut bahkan sirna sama sekali. Hal yang demikian terjadi karena proyek pembangunan desa baru terlaksana dalam bentukan program yang belum dapat dihayati masyarakat desa sendiri. Sehingga program yang tadinya berjalan dengan baik karena adanya petugas yang memberikan bimbingan, lama kelamaan tersendat-sendat setelah bimbingan dan bantuan dikurangi atau mereka dilepas untuk bekerja sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. untuk menekan faktor penghambat khususnya sosial budaya masyarakat Desa Urek-urek yang cenderung ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide sehingga aspirasi atau keinginan yang ada sangat rendah dan terbatas untuk menggapai masa depan. Ini dapat diatasi melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat secara langsung, yaitu dengan mengenalkan suatu program sekaligus mengajak masyarakat untuk

- mengerti tentang tujuan-tujuan program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat seperti bantuan yang turun tidak sesuai dengan jumlah yang mereka harapkan kerana kurangnya dana bantuan. Tentunya bantuan ini disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Maka dalam pikiran masyarakat timbul bahwa program ini kurang berperan bagi masyarakat dan menyalahkan BPM, karena menguntungkan sebagian kecil masyarakat saja. Masalah ini bisa diatasi dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat desa tanpa menonjolkan secara berlebihan bentuk formal BPM dan secara bertahap memberikan pengertian apa sebenarnya BPM.
 3. Kurangnya interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah bisa jadi penghambat kelancaran pelaksanaan program. Hal yang demikian terjadi menjadikan proyek pembangunan desa baru terlaksana dalam bentuk program belum dapat dihayati masyarakat desa sendiri. Sehingga program yang tadinya berjalan dengan baik karena adanya petugas yang memberikan bimbingan, lama kelamaan tersendat-sendat setelah bimbingan dan bantuan dikurangi atau mereka dilepas untuk bekerja sendiri. Untuk mengatasinya petugas lapangan yang berinteraksi dengan masyarakat harus dibekali dengan penguasaan program yang baik dan pengetahuan akan kultur dan kondisi lainnya pada masyarakat desa. Sehingga bimbingan yang diberikan memberi penguatan motivasi masyarakat desa akan arti pembangunan. Dengan interaksi yang demikian maka masyarakat desa dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tidak beranggapan bekerja untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri.
 4. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai kepada para pengrajin tahu dan tempe lebih efektif, bila alat yang diberikan tidak menjadi hak milik perorangan. Tetapi digunakan untuk semua anggota kelompok pengrajin tahu dan tempe di Desa Urek-urek. Dari masing-masing anggota ditarik iuran guna biaya perawatan alat dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 1995. *Pembangunan ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta : PAU se-UGM dan BPFE.
- Arikunto, Suharsimi, Abdul Jabar, Cepi Safruddin. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Combs, Philip H. dan Manzoor Ahmed. 1985. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-formal*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Chambers, R. 1995. "Poverty And Livelihoods: Whose Reality Count?" Dalam *Uner Kirdar Dan Leonard Silk (ed). People From Improverisment To Empowerment*. New York: New York University
- Friedman, John.1992. *Empowerment: The Politics Of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Hasan, Iqbal, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juoro, Umar. 1985. *Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CDIS.
- Koentjoroningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Leibo, Jefta.1995. *Sosiologi Pedesaan. Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1999. *Analisa Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mubyarto. 1998. *Membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Gunung Agung.

Pranarka, A.M.W dan Onni S. Prijono, 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : IDEA dan Pustaka Pelajar.

Suprpto, Riyadi. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang: UM Press.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM Press. Malang.

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP

Jurnal dan Internet

Bahar, Asrul. *Produksi Tempe Dengan Menggunakan Mesin Penggerak Motor Listrik*. Universitas Negeri Surabaya. Di akses tanggal 18 Agustus 2007 dari <http://www.dikti.org>

Puspaningrum, A, dkk. 2001. *Strategi Keluarga miskin dalam menanggulangi rendahnya tingkat penghasilan di daerah perkotaan jawa timur*. Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol. 13 No.2

Gunanta, A. Mahfud. 2003. *Penyaluran Kredit Oleh Bank, Sektor Usaha Mana Yang Menjadi Prioritasnya*. Diakses pada tanggal 24 April 2006 dari <http://www.Media Indonesia.co.id>